

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PEMENANGAN AKMAL
IBRAHIM PADA PILKADA KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA2017**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**THAIBAH
NIM : 140401128**

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1439 H/2018 M**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program Sarjana dalam bidang
Komunikasi Penyiaran Islam

Diajukan Oleh:

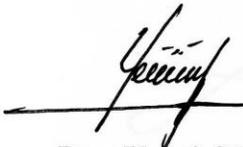
THAIBAH

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam

NIM : 140401128

Disetujui Oleh:

Pembimbing Pertama,



Drs. Yusri, M.Lis

NIP. 19671204 199403 1 004

Pembimbing Kedua,



Fairus, S.Ag., MA

NIP. 19740504 200003 1 002

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh

**THAIBAH
NIM. 140401128**

Pada Hari/Tanggal

**Jumat, 20 Juli 2018 M
7 Dzulkaidah 1439 H**

di

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,



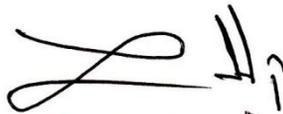
**Drs. Yusri, M.Lis
NIP. 19671204 199403 1 004**

Sekretaris,



**Fairus, S.Ag., MA
NIP. 19740504 200003 1 002**

Anggota I,



**Zainuddin, T, M.Si
NIP. 19701104 200003 1 002**

Anggota II,



**Arif Ramdan, S.Sos., MA
NIDN. 0231078001**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



**Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 19641129 199803 1001**



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Thaibah

NIM : 140401128

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 11 Juli 2018
Yang Menyatakan,



Thaibah
140401128

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Tokoh Revolusioner serta junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu beban untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial. Untuk itu penulis memilih judul **“Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Akmal Ibrahim Pada Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017”**. Meskipun demikian penulis masih sangat merasa kekurangan dan keterbatasan ilmu, akhirnya dengan izin Allah jualah segala rintangan dapat dijalankan.

Takzim dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada Ayahanda tercinta Syafaruddin, dan ibunda tercinta Narmila merupakan kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan mendoakan penulis untuk menjadi anak yang berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita yang diharapkan serta dengan tetesan keringat dan cucuran air matanyalah yang tidak

mengenal rasa lelah demi membiayai perkuliahan penulis dari awal sampai akhir. Sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terimakasih tak terhingga juga kepada kakak ku tercinta Pardila dan Rahmadsyah yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar tidak pernah berhenti untuk meraih harapan keluarga, juga kepada adikku tersayang Nia, Rika, Shabir, Khayla yang selalu memberi dukungan dan doa yang tak terhingga.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah turut memberikan petunjuk, bimbingan dan motivasi yang sangat berharga, dan telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan informasi-informasi dan arahan yang berguna dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka penulis mengucapkan ribuan terimakasih dengan tulus ikhlas kepada :

1. Bapak Drs, Yusri, M.Lis Sebagai pembimbing pertama dan Bapak Fairus, S. Ag., MA, sebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.
2. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., MA sebagai Dekan Fakultas Dawah dan Komunikasi. Bapak Dr. Hendra Syahputra, ST., MM. sebagai Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan kepada Ibu Anita S. Ag., M.Hum sebagai Penasehat Akademik (PA) Serta semua dosen yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik penulis selama ini, kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

3. Kepada sahabat-sahabatku tercinta, Uli, Rika, Indah, Mega, Shella, Yuni, Lia, Aswah, Nurul, Fendi, Yati, Muna, semua kawan-kawan leting 2014 yang akan menjadi sarjana selanjutnya yang telah membantu semangat dan arahnya .Dan juga kepada teman satu atap yaitu adek kost yang telah sangat mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai tahap kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi panulis kiranya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam naungan-Nya.Amin-amin Ya Rabbal A'lamin...

Banda Aceh, 11 Juli 2018

Thaibah

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II: LANDASAN TEORITIS	
A. Defenisi Ilmu Komunikasi dan Politik	10
B. Komunikasi Politik	24
C. Strategi Komunikasi Politik.....	40
D. Pilkada	43
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian.....	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
C. Objek Penelitian.....	52
D. Batasan Penelitian	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	55
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Profil Lembaga	56
B. Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya	69
C. Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Tim Pemenangan Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017	75
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: “Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Akmal Ibrahim pada Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi politik pemenangan Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017 dan untuk mengetahui peluang dan tantangan Tim pemenangan Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi Di Kabupaten Aceh barat Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilakukan dalam bentuk empat tahapan aksi; pertama, mendengar; kedua, mengajak; ketiga, bicara; dan keempat, menang. Keempat tahapan aksi ini diterapkan pada tahun pemenangan pilkada menjelang pilkada 2017. Dalam menjalankan empat tahapan aksi pemenangan pilkada tersebut, tim pemenangan pasangan Akmal Ibrahim, SH dan Muslizar MT menggunakan strategi komunikasi politik dengan pendekatan komunikasi interpersonal, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Peran media pada pilkada legislatif 2017 sangatlah penting, sehingga hampir semua calon menggunakannya. Bentuk-bentuk komunikasi politik dalam media massa ini bisa berupa iklan, press release, dan dialog interaktif. Sesuai dengan teori model Lasswell: Pembicara – pesan – media – pendengar – pengaruh. Sedangkan Peluang dan tantangan yang dihadapi tim pemenangan dalam menjalankan strategi komunikasi politik Akmal Ibrahim pada Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017, Peluang bagi tim Akmal Ibrahim adalah terus menciptakan rasa sosial dan melakukan komunikasi dengan baik supaya proses pelaksanaan program kedepan lebih baik lagi, masyarakat juga sangat menerima kedatangan tim juga merespon dengan baik komunikasi politik yang tim lakukan. Selain itu peluangnya adalah banyaknya program Bapak Akmal Ibrahim pada periode 2007-2012 yang lebih kepada pro rakyat petani sehingga sangat mudah mempromosikan kepada petani, apalagi mayoritas masyarakat Aceh Barat Daya adalah berkerja sebagai petani. Program yang dicetuskan dalam visi dan misinya dalam periode ini pun juga sangat memperhatikan masyarakat petani, sehingga sangat masuk akan untuk menjelaskan programnya.

Kata Kunci: *Strategi, Komunikasi Politik, Pilkada.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menyebut komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya berkomunikasi. Al-Qur'an memberikan kata kunci (*keyconcept*) yang berhubungan dengan hal itu. Al-Syaukani, misalnya mengartikan kata kunci *al-bayan* sebagai kemampuan berkomunikasi. Selain itu, kata kunci yang dipergunakan Al-Qur'an untuk komunikasi ialah *al-qaul*. Dari *al-qaul* ini, Jalaluddin Rakhmat menguraikan prinsip, *qaulan sadidan* yakni kemampuan berkata benar atau berkomunikasi dengan baik.¹

Dengan komunikasi, manusia mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan interaksi sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Secara sosial, kegagalan komunikasi menghambat saling pengertian, menghambat kerja sama, menghambat toleransi, dan merintang pelaksanaan norma-norma sosial Al-Qur'an menyebut komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Dalam QS. Al-Rahman (55) / 1 – 4:

الرَّحْمٰنُ ۱ عَلَّمَ الْقُرْءَانَ ۲ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۳ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۴

Artinya: *Tuhan yang Maha pemurah, Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara.*²

Begitu besarnya anuran berkomunikasi yang baik dalam Islam, terutama dalam kehidupan sosial, maka sangat diperlukan strategi komunikasi yang andal

¹ Rahmat, *Efektivitas Berkomunikasi dalam Islam*, Cet. I; (Bandung: Mizan, 1999), hal.71.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2001), hal. 885.

dari komunikator. Strategi komunikasi merupakan panduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi (*management communication*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi.³

Dalam suatu organisasi politik khususnya, komunikasi berfungsi untuk mempengaruhi (persuasi), dan mengalirkan informasi, baik keatas dan kebawah (vertikal), kesamping (horizontal), maupun menyilang (diagonal). Didalam organisasi juga terdapat komunikasi formal serta komunikasi informal. Secara perinci, komunikasi berfungsi sebagai pengawasan, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi.⁴ Melihat betapa pentingnya strategi berkomunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, maka sebagian para tokoh politik pun berusaha mengalahkan lawan politiknya dengan menggunakan strategi berkomunikasi. Salah satu gambaran komunikasi dalam berpolitik sering terlihat dalam suasana menghadapi Pilkada.

Saat ini pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), telah menjadi agenda penting bagi setiap daerah.⁵ Pemilihan kepala daerah yang kemudian disingkat menjadi Pilkada adalah salah sebuah cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan siapa pemimpin yang akan menjalankan system pemerintahan.

³Rafardhan, *Strategi Radio "Silaturahmi" Am 720 Cibubur Bekasi Dalam Mempertahankan Eksistensinya Sebagai Media Dakwah*, (Semarang: Universitas Islam NegeriWalisongo, 2015), hal. 34-38.

⁴Deddy Mulyana. *Ilmu Komunikasi*. (Bandung: PT. Rosdakarya, 2011), hal.212.

⁵Arifin Lelah. Strategi Incumbent Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Situro Tahun 2013. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Diakses: 10 Agustus 2017.

Para calon pemimpin daerah ini kelak akan dipilih oleh masyarakat setempat. Menurut “PP NO 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepada daerah dan wakil kepala daerah” telah menjelaskan bagaimana tata cara melakukan Pilkada, dimulai dari cara pemilihannya, cara mencalonkan diri beserta syaratnya serta anggarannya termasuk dana kampanye.

Pilkada dilaksanakan dalam tenggang waktu lima tahun sekali, tetapi masing-masing daerah memiliki waktu dan tahun yang berbeda-beda dan hal inilah yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat melalui DPR komisi II selaku bidang kepemiluan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).⁶

Dengan diberikannya kebebasan kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya, maka masyarakat menjadi pelaku untuk menentukan pemimpinnya baik Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dan masyarakat tidak lagi hanya sebagai penonton proses politik yang selama ini dipilih oleh DPRD. Sama halnya dengan pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya yang diselenggarakan secara langsung dan serentak akan lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan Pilkada langsung itu diyakini memiliki peluang atau kesempatan yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih

⁶Apriansyah, Aldi, Strategi Pemenangan Pasangan Sri Purnomo Dan Sri Muslimatun Dalam Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah*. (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hal 1-2.

secara langsung pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi.⁷

Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini resmi berdiri setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002. Kabupaten yang sering disebut dengan singkatan "ABDYA" ini hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan bukanlah merupakan eksekusi dari reformasi pada tahun 1998 semata. Meskipun perubahan pemerintahan nasional saat itu mempercepat pemekaran tersebut, namun wacana untuk pemekaran itu sendiri sudah berkembang sejak sekitar tahun 1960-an.

Sebagaimana di kabupaten lainnya, masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka memilih calon pemimpinnya melalui pemilihan umum Bupati juga sudah berlangsung sejak tahun 2004-2005. Pemilu secara langsung yang melibatkan partisipasi masyarakat di kabupaten Aceh Barat Daya bahkan berlangsung hingga tahun 2017. Pilkada serentak yang diadakan di tahun 2017 dilaksanakan pada Februari 2017 yang bertujuan untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2017–2022. Jadi terlihat jelas bahwa keterlibatan masyarakat dalam Pilkada tahun 2017 ini bukanlah menjadi suatu hal yang baru dalam kehidupan berpolitik masyarakat setempat.

Melihat perkembangan sosial ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya yang terus berkembang, maka pada Pilkada 2017 ini pasangan calon yang naik berjumlah 10 pasangan. Setelah pemungutan suara, maka hasil akhir Pilkada Aceh Barat Daya 2017 yang sudah ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi suara KIP

⁷Tarigan, Marlina, Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008. *Tesis*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hal. 1-3.

Aceh Barat Daya, adalah sebagai berikut: Akmal Ibrahim dan Muslizar meraih suara sah 28.138 (35,39%), Muchlis MS dan Syamsinar 20.334 suara (25,57%), Erwanto dan Muzakkir ND 13.108 suara (16,49%), Maidisal Diwa dan Ruslan 7.989 suara (10,05%), H.M. Qudus Marfali dan Hamdani 5.346 suara (6,72%), Zainal Arifin dan Said Azhari 1.678 suara (2,11%), Muazam dan Hermansyah 1.237 suara (1,56%), Hasbi M Saleh dan Tgk T. Alamsyah Yusfa 1.174 suara (1,43%) dan Junaidi dan Edwar Rahman 501 (0,64%). Jumlah suarasah 79.514 dari 85.591 orang yang menggunakan hak suaranya. Sedangkan dalam DPT tercantum 103.134 pemilih, sehingga tingkat partisipasinya 82,02%.

Berdasarkan hasil perolehan suara di atas, maka terlihat bahwa pasangan dengan nomor urut 1 yaitu Akmal Ibrahim dengan Muslizar merupakan pemenang pilkada Aceh Barat Daya dan menjadi bupati dan wakil bupati pada periode 2017-2022. Kemenangan pasangan ini tentu tidak bisa dilepaskan oleh strategi yang mereka gunakan untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat setempat. Untuk mendapatkan dukungan tersebut banyak hal yang mereka lakukan seperti melancarkan kampanye saat menjelang pemilu, melakukan komunikasi interpersonal dengan masyarakat dan memberikan berbagai bantuan baik berupa dana atau lainnya.

Kemenangan pasangan nomor urut 1 ini juga tidak bisa dilepaskan oleh faktor baik yang bersifat internal seperti pengaruh tokoh politik Akmal Ibrahim yang pernah menjabat sebagai bupati pada periode 2008-2012. Selain itu faktor eksternal berupa kepercayaan masyarakat akan pasangan ini karena masa kepemimpinan Akmal Ibrahim sebelumnya lebih memperhatikan masyarakat dari

berbagai kalangan. Jika dilihat dari sosok seorang Akmal Ibrahim merupakan tokoh politik muda yang pernah menjabat bupati pada periode sebelum naiknya bupati Ir. Jufri Hasanuddin, MM. Kegagalan Akmal Ibrahim dalam memenangkan pemilu pada periode sebelumnya tidak bisa dilepaskan dari kasus korupsi sengketa tanah yang menimpa dirinya.

Hal ini membuat sebagian masyarakat hilang kepercayaannya. Sekalipun mengalami berbagai dinamika dalam politiknya, Akmal Ibrahim dan tim pendukungnya tidak berputus asa, hal ini dibuktikan dengan mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017 dan berhasil meraih kemenangan. Hal ini tentu menarik untuk dikaji kembali, faktor apa yang membuat kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap pasangan Akmal Ibrahim dan Muslizar jika dilihat dari aspek komunikasi politik yang dilancarkan?

Akmal Ibrahim dan Muslizar merupakan calon bupati yang naik melalui partai politik besar yaitu partai Demokrat. Hal ini tentu membawa pengaruh juga bagi pemilih terutama banyak tokoh dari partai ini memiliki gaya komunikasi dalam menarik masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut satu. Pengaruh komunikasi yang baik ini membawa pasangan Akmal Ibrahim dan Muslizar meraih kemenangan karena para pemilih yang berhasil direkrut dengan strategi komunikasi para pendukung pasangan Akmal Ibrahim dan Muslizar tidak hanya kalangan bawah seperti petani, melainkan juga berhasil mempengaruhi dukungan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tokoh ulama dan tokoh adat dan bahkan di kalangan pelajar yang sudah memiliki hak untuk memilih.

Menangnya pasangan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari strategi komunikasi yang digunakan oleh tim suksesnya baik dalam berkampanye atau pun berinteraksi dengan masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Hal ini menarik untuk diadakan suatu penelitian terkait strategi komunikasi yang bagaimana dilakukan oleh tim pemenang Pilkada ABDYA 2017 tersebut. Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul: **Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Akmal Ibrahim dan Muslizar MT Pada Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah

1. Bagaimana strategi komunikasi politik pemenangan Akmal Ibrahim dan Muslizar MT pada Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017?
2. Peluang dan tantangan apa saja yang dihadapi tim dalam menjalankan strategi komunikasi politik pemenangan Akmal Ibrahim dan Muslizar MT pada Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi politik pemenangan Akmal Ibrahim dan Muslizar MT pada Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan tim pemenangan Akmal Ibrahim dan Muslizar MT pada Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh pasangan Akmal Ibrahim dan Muslizar MT dalam memenangkan Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, tulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan keberhasilan pelaksanaan proses pembangunan politik yang demokrasi melalui pelaksana Pemilu pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kaitannya dengan strategi komunikasi politik Pilkada.

E. Definisi Operasional

1. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi (*management communication*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi.⁸

2. Pilkada

⁸Rafardhan, *Strategi Radio "Silaturahmi" Am 720 Cibubur Bekasi Dalam Mempertahankan Eksistensinya Sebagai.....*, hal.34-38.

Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Adapun yang dimaksud Pilkada dalam skripsi ini ialah pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan tahun 2017 untuk memilih kepala daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, penulis juga merasa perlu untuk membuat sebuah sistematika penulisan yang meliputi dari lima bab:

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

Bab dua berisi kajian teoritis yang menjelaskan semua yang berkaitan dengan judul yang penulis buat tentang komunikasi, politik, komunikasi politik, dan strategi komunikasi politik, yang juga disertai dalam perspektif Islam, serta pemilu dan sejarah awal munculnya pemilu di Indonesia.

Bab tiga adalah Metode penelitian yang meliputi: rancangan penelitian, metode yang digunakan, operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, batasan penelitian, serta teknik pengumpulan data.

Bab empat adalah bab yang disebut dengan isi dari semuanya atau hasil penelitian dari permasalahan yang diangkat.

⁹M. Aziz, Noor, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2009), hal. 7-8.

Bab lima merupakan bab yang terakhir atau bab penutup yang terdiri dari kesimpulan keseluruhan penelitian ini serta saran-saran yang di perlukan guna untuk yang lebih baik kedepannya.

Semoga dengan adanya sistematika penulisan pada bab satu dapat mempermudah penulis khususnya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan juga bagi pembaca sekalipun pada umumnya guna untuk mempermudah dalam membacanya.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Definisi Ilmu Komunikasi dan Politik

1. Pengertian Ilmu Komunikasi

Kata atau istilah komunikasi (dari bahasa Inggris “*communication*”), secara etimologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin *Comunis*, bersumber pada kata *Communis*. *Communis* adalah sama dalam arti kata sama makna yaitu makna mengenai suatu hal. Secara terminologi komunikasi berarti proses penyampaian pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Berdasarkan pengertian di atas jelas, komunikasi melibatkan sejumlah orang, seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain.¹

Sedangkan menurut Harold Lasswell adalah proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai panduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, dan kepercayaan, harapan imbauan dan sebagainya, yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik langsung atau pun tak langsung melalui media, dengan tujuan mengubah sikap, pandangan atau perilaku.² Secara paradigmatis komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media.³

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi-informasi, pesan-pesan, gagasan-gagasan atau pengertian-pengertian dengan menggunakan lambang-

¹ Ardial, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: PT Indek Permata Puri Media, 2010), hal. 21.

² Onong Uchana Effendy, *Kamus Komunikasi*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hal. 60.

³ Onong Uchana Efendy, *Dimensi-Dimensi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Karya, 1992), hal. 5.

lambang yang mengandung arti atau makna, baik secara verbal maupun non-verbal dari seseorang atau kelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian dan/atau kesepakatan bersama.⁴

Dari diatas bisa diringkaskan bahwa komunikasi adalah proses interaksi antara komunikator (yang menyampaikan pesan) dan komunikan (penerima pesan) untuk mencari kesamaan makna dan merubah sikap, baik secara lisan, tulisan (verbal) maupun dengan gerakan, lambang dan warna (non-verbal). Komunikasi yang dilakukan oleh manusia dapat menggunakan berbagai macam cara dan beraneka ragam.

Dengan menggunakan berbagai alat dan isyarat, baik langsung seperti lisan dan tulisan gerakan tubuh, hal ini dapat dilakukan secara pribadi maupun dengan media massa yang terhubung keseluruh dunia, ketika manusia sedang melakukan interaksi satu sama lain dengan menukar pesan dan ketika itulah terjadi komunikasi.

Perkembangan ilmu komunikasi berawal sejak retorika terlahir sebagai pengetahuan dan seni berbicara secara lisan dan tatap muka dalam konteks publik. Hal ini terjadi pada zaman yunani kuno dan sempat menghilang dari disiplinnya.⁵ Sejarah media cetak merupakan sebuah siklus teknologi yang terus menerus berkembang, teknologi yang memfasilitas penerbitan. Johan Gutenbeng tahun 1400-1468, seorang pendeta kristen menemukan mesin cetak. Penemuannya

⁴T. May Rudy, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*, (Bandung: Refika Aditama 2005), hal. 1.

⁵Dani Vardiansyah, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Bogor Selatan: Ghilia Indonesia 2004), hal, 4.

adalah dibidang huruf cetak yang bisa bergerak, berupa metal logam campuran dan mengembangkan cairan logam untuk mencetak huruf balok secara tepat dan teliti, membuat tinta cetak serta penekanan yang diperlukan untuk mencetak.⁶

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam komunikasi, dapat diuraikan berdasarkan definisi komunikasi yang telah disampaikan oleh Lasswell, yaitu:

a. Sumber (Komunikator)

Komunikator adalah semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Seorang atau sekelompok orang yang merupakan tempat asal pesan, sumber berita, informasi atau pengertian yang disampaikan (dikomunikasikan) atau bisa kita sebut sebagai orang atau pihak yang mengirim/ menyampaikan berita.⁷

Dalam proses interaksi komunikasi selain komunikator sebagai orang menyampaikan pesan kepada orang lain terkadang komunikator juga bisa menjadi seorang komunikan (orang yang menerima pesan yang disampaikan komunikator) begitu juga sebaliknya seorang komunikan juga bisa menjadi seorang komunikator.

b. Pesan

Pesan adalah keseluruhan dari pada yang disampaikan oleh komunikator. Informasi atau pengertian dari komunikator yang penyampaiannya diberikan kepada komunikan (audien/khalayak) melalui penggunaan bahasa atau lambang-lambang. Lambang atau simbol tersebut dapat berupa tulisan, gambar, gerakan tubuh, lambaian tangan, kedipan mata, sinar, warna, kode morse dan lain-lain.

⁶ Suf, Kasman, *Jurnalisme Universal*, Cet Pertama, (Jakarta Selatan: 2004), hal. 18.

⁷ T. May Rudy, *Komunikasi & Hubungan Masyarakat Internasional*, (Bandung: Refika Aitama, 2005), hal. 4.

Saluran/media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan dari sumber (komunikator) kepada penerima (komunikan).

c. Media (Saluran)

Media adalah perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator, maka oleh itu sering disebut dengan media komunikasi dapat berwujud media komunikasi cetak dan non-cetak. baik verbal dan non-verbal

d. Penerima

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber, apa bila pesan tidak diterima oleh penerima, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah yang sering kali menuntut perubahan, apakah pada sumber, pesan, atau saluran.

e. Umpan balik/efek

Apa yang terjadi pada penerima setelah dia menerima pesan tersebut, misalnya penambahan pengetahuan (dari tidak tahu menjadi tahu), terhibur, perubahan sikap (dari tidak setuju menjadi setuju), perubahan keyakinan, perubahan perilaku (dari tidak bersedia membeli barang yang ditawarkan menjadi bersedia atau dari tidak bersedia memilih partai politik tentu menjadi bersedia memilihnya dalam pemilu), dan sebagainya.⁸

Efek dalam komunikasi merupakan hal sangat penting karena berjalan nya atau tidak sebuah interaksi komunikasi juga terjadi karena adanya efek dari yang disampaikan.

⁸Deddy Mulyana, *Ilmu Politik, Suatu Pengantar*, (Bandung : Rosdakarya, 2007), hal. 71.

2. Tujuan Komunikasi

Komunikasi merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernafas. Sepanjang hidup maka manusia akan memerlukan komunikasi⁹. Maka dapat dikatakan bahwa antara manusia dan komunikasi tidak dapat dipisahkan. Seorang manusia keberadaannya tidak akan dirasakan jika tidak melakukan komunikasi, begitu pula sebaliknya, tidak ada komunikasi jika tidak ada manusia.

Hal tersebut membuktikan bahwa antara manusia dan komunikasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Contoh dalam sehari-hari, apapun yang kita lakukan pasti kita perlu berkomunikasi dengan orang lain, tanpa adanya komunikasi pasti tidak akan berjalan dengan baik.

3. Proses Komunikasi

Proses komunikasi adalah rangkaian kejadian/ peristiwa atau perbuatan melakukan hubungan, kontak, interaksi, suatu sama lain (pada umumnya diantara makhluk hidup lebih jauh dalam era *cyber technology* ini telah dimungkinkan komunikasi dengan komputer dan robot) berupa penyampaian dan permintaan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna.¹⁰

Proses komunikasi yang baik adalah apabila hubungan /interaksi dalam rangka penyampaian pesan, informasi, berita, pengertian yang dilakukan tertuju pada penerima pesan, informasi itu, dan secara timbal balik, disampaikan melalui saluran-saluran (media) yang cocok/tepat/ sesuai isi pesan dan isi pesan disusun dengan sebaik-baiknya secara jelas, tegas, pasti dapat dipahami oleh pihak-pihak

⁹ A.w. Widjaja, *Ilmu Komunikasi pengantar studi*, (Jakarta: Rineka cipta, 2000), hal. 66.

¹⁰ T. May Rudy, *Komunikasi & Hubungan Masyarakat Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 2.

yang terlibat dalam proses hubungan penyampaian dan penerimaan pesan. Ada dua peninjauan perspektif proses komunikasi:

a. Proses Komunikasi dalam perspektif psikologi

Proses komunikasi perspektif terjadi pada diri komunikator dan komunikan. Bahwa sudah jelas pesan komunikasi terdiri dari dua aspek, yakni isi pesan dan lambang. Isi pesan umumnya adalah pikiran, sedangkan lambang umumnya adalah bahasa.

b. Proses Komunikasi dalam perspektif mekanistik

Proses ini berlangsung ketika komunikator mengoperkan atau “melemparkan” dengan bibir kalau lisan atau tangan juga tulisan pesannya sampai ditangkap oleh komunikan. Proses komunikasi dalam perspektif ini kompleks atau rumit, sebab bersifat situasional, bergantung pada situasi ketika komunikasi berlangsung.¹¹

4. Model-Model Komunikasi

a. Model Aristoteles

Pembicara → argumen → pidato → pendengar

Model komunikasi yang di buat Aristoteles belum menempatkan unsur media dalam proses komunikasi. Hal ini bisa dimengerti, karena retorika pada masa Aristoteles merupakan seni keterampilan komunikasi yang sangat populer. Media seperti surat kabar, radio dan televisi belum tersedia.

b. Model Lasswell

Pembicara → pesan → media → pendengar → pengaruh

¹¹Onong Uchana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Citra, Aditya Bakti. 1993), hal. 1-32.

- c. Aspek sosial, seperti: norma kelompok, nilai sosial, dan karakteristik budaya.
- d. Aspek waktu, yakni kapan berkomunikasi (hari apa, jam berapa, pagi, siang, sore, malam).¹³

Indikator paling umum untuk mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteksnya atau tingkatnya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. Maka dikenal: komunikasi intra-pribadi, komunikasi diadik, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok (kecil), komunikasi publik, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa.¹⁴ penjelasan kategori komunikasi berdasarkan konteksnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Komunikasi Intra pribadi

Komunikasi Intra pribadi adalah komunikasi yang terjadi didalam komunikator atau lazim disebut komunikasi dengan diri sendiri.¹⁵ Komunikasi dengan diri sendiri proses komunikasi yang terjadi didalam diri individu. Terjadinya proses komunikasi disini karena adanya seseorang yang memberi arti terhadap sesuatu objek yang diamatinya atau atau terbetik dalam pikirannya.

b. Komunikasi Antar pribadi

Komunikasi Antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal atau pun non verbal. Bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi adalah komunikasi diadik (*dyadic communication*) yang melibatkan

¹³Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran....*, hal. 77.

¹⁴Cassandra L. Book, *Human Communication: Principles, Context, and skill*, dalam buku Deddy Mulyana, *Ilmu Politik: Suatu Pengantar*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hal.78.

¹⁵Dani Vardiansyah, *Pengantar Ilmu Komunikasi....*, hal. 30.

hanya dua orang seperti suami-istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid, dan sebagainya.¹⁶

c. Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok apabila jumlah pelaku komunikasi lebih dari tiga orang, cenderung dianggap komunikasi kelompok kecil atau komunikasi kelompok saja.¹⁷ Jumlah dalam komunikasi kelompok tidak bisa ditentukan jumlah.

d. Komunikasi Publik (*public communication*)

Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang atau khalayak, yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi demikian sering juga disebut pidato, ceramah, atau kuliah (umum). Tabligh akbar yang sering disampaikan pendakwah kondang K.H. Zainuddin MZ atau Aa Gym adalah contoh komunikasi publik yang paling dikenal dengan komunikasi kelompok besar (*large groups communication*) untuk komunikasi ini.¹⁸

e. Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia (*human communication*) yang terjadi dalam konteks organisasi dimana terjadi jaringan-jaringan pesan satu sama lain yang saling bergantung sama lain.¹⁹

¹⁶Deddy Mulyana, *Ilmu Politik: Suatu Pengantar....*, hal. 81.

¹⁷Dani Vardiansyah, *Pengantar Ilmu Komunikasi....*, hal. 30.

¹⁸Deddy Mulyana, *Ilmu Politik: Suatu Pengantar....*, hal. 82.

¹⁹Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Prenada Media Group), hal. 27.

f. Komunikasi Massa (*Mass Communication*)

Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai macam tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula.

6. Pesan-pesan Komunikasi

Satropoetro memberikan pengertian bahwa pesan (*encoding*) merupakan suatu kegiatan penting, sulit menentukan apakah gagasan yang ada dapat dituangkan secara pasti kedalam lembaga yang berarti dan telah disusun sedemikian rupa, sehingga menghindari timbulnya salah paham.

Pratikno mendefinisikan pesan dengan melihat dari bentuknya, yaitu: *“pesan adalah semua bentuk komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Yang dimaksud dengan komunikasi verbal adalah komunikasi lisan, sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi dengan simbol, isyarat, sentuhan perasaan dan penciuman”*.²⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pesan adalah suatu materi yang disampaikan kepada orang lain dalam bentuk gagasan baik verbal maupun non-verbal, untuk menyatakan maksud tertentu sesuai dengan kebutuhan orang lain berkenaan dengan manfaat dan kebutuhannya.

Membicarakan pesan (*message*) dalam proses komunikasi, kita tidak bisa lepas dari apa yang di sebut simbol dan kode, karena pesan dikirim komunikator

²⁰Hafied Canggara, *Pengantar Ilmu Komunika*s, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) Cetakan IV, hal. 67.

kepada penerima terdiri atas rangkai simbol dan kode. Sebagai makhluk sosial dan makhluk komunikasi, manusia dalam hidupnya diliputi oleh berbagai macam simbol, baik yang diciptakan oleh manusia itu maupun yang bersifat alami.

Manusia dalam keberadaannya memang memiliki keistimewaan dibanding dengan makhluk yang lain. Selain kemampuan daya pikirnya, manusia juga memiliki keterampilan berkomunikasi yang lebih indah dan lebih canggih, sehingga dalam berkomunikasi mereka bisa mengatasi rintangan jarak dan waktu. Manusia menciptakan simbol-simbol dan memberi arti pada gejala-gejala alam yang ada disekitarnya, sementara hewan hanya dapat mengandalkan bunyi.

Simbol-simbol yang di gunakan selain sudah ada yang diterima menurut konvensi internasional, seperti simbol-simbol lalu lintas, alfabet latin, simbol matematika, juga terdapat simbol lokal yang hanya bisa dimengerti oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Banyak kesalahan komunikasi (*misscommunication*) terjadi dalam masyarakat karena tidak memahami simbol-simbol lokal.

Menurut Canggara bahwa simbol adalah suatu proses komunikasi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang berkembang pada suatu masyarakat.

Simbol tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Semua kode memiliki unsur nyata
- b. Semua kode memiliki arti
- c. Semua kode tergantung pada persetujuan para pemakainya
- d. Semua kode memiliki fungsi

- e. Semua kode dapat dipindahkan, apabila melalui media atau saluran-saluran komunikasi lainnya.²¹

Kode pada dasarnya dapat dibedakan atas dua macam, yakni kode verbal (bahasa) dan kode non-verbal (isyarat).

7. Ilmu Politik

- a. Pemahaman tentang ilmu politik

Kata-kata politik tentu tidak asing lagi bagi masyarakat kita, namun pemahaman yang mendalam tentang ilmu politik tentu saja belum familiar kata-kata politik itu sendiri. Hal ini dikarenakan ilmu politik hanya dipelajari secara mendalam oleh segelintir orang di universitas-universitas, organisasi-organisasi politik (partai politik atau lembaga-lembaga sosial-politik) atau praktisi politik itu sendiri.

Politik dalam bahasa Arabnya disebut “*siyasah*” atau dalam bahasa Inggrisnya disebut “*politic*”. Politik itu sendiri berarti cerdas atau bijaksana. Memang dalam sehari-hari kita mengartikan politik sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, tetapi sebenarnya para ahli ilmu politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi tentang ilmu politik.²²

Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata “*polis*” yang berarti “negara kota” dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan.²³ Dalam “kamus komunikasi” disebutkan politik berasal dari bahasa

²¹Hafied Canggara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 102-103.

²²Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka cipta, 2000), hal. 8.

²³Robert Dahl, *Modern Political Analysis*, Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*.....,hal. 19.

Latin “*politi(cus)*” atau dalam bahasa Yunani “*politicos*”. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politic* atau kepolitikan. Miriam Budiarjo menyebutkan "politik adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik."²⁴

Politik juga dikenal dengan kegiatan yang dapat menjalankan, mengarahkan dan mempertahankan kekuasaan di dalam masyarakat. Politik diibaratkan sebagai sebuah taktik, strategi, atau seni dalam sebuah pemerintahan. Ada juga yang menyebutkan politik sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud pada proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara demokrasi.²⁵ Sedangkan para ahli lainnya memberikan definisi ilmu politik sebagai berikut:

- 1) Deliar Noor: "Ilmu politik adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan untuk mempengaruhi, mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat."²⁶
- 2) Menurut Rod Hague Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara para anggota.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan ilmu politik adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan bernegara. Berbicara politik tentu saja tidak terlepas dari kekuasaan, hal tersebut dikarenakan

²⁴Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2008), hal. 13.

²⁵Ng. Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi Dan Politik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 90.

²⁶Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setya, 2012), hal. 61.

dari dengan adanya penguasa maka kehidupan yang lebih baik akan tercapai sebagaimana yang telah disebut sebelumnya.

b. Perkembangan ilmu politik

Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang sudah jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya, karena baru lahir pada abad ke-19. Pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi yang dalam perkembangan ini saling mempengaruhi.

Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dari rangka yang lebih luas maka pembahasan yang rasional dari berbagai aspek negara, kehidupan pemerintahan atau kekuasaan, hingga kegiatan politik lainnya, maka ilmu politik dapat dikatakan sebagai “ilmu sosial yang tertua” didunia.²⁷ Perkembangan ilmu politik secara pesat dimulai pasca perang dunia ke II, dimana pada saat itu para peneliti menilai bahwa negara-negara di dunia dimonopoli oleh fakultas hukum, seperti halnya negara belanda telah didirikan fakultas hukumpada tahun 1947 di Amstredam.

Begitu juga halnya perkembangan perpolitikan dalam sebuah negara sangat di pengaruhi oleh kebudayaan yang melekat pada negara tersebut seperti perjalanan perpolitikan di Indonesia yang sangat di pengaruhi oleh budaya dan suku Jawa. Kenyataan ini juga dapat dilihat dari pemegang kekuasaan di negara ini, mulai dari bangku kepresidenan, menteri-menteri, hingga MPR yang hampir sebagian besar di pegang orang-orang yang berasal dari suku jawa.

²⁷Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 1.

Begitu pula dengan anggota perlemen-perlemen ditubuh DPR yang didominasi oleh mereka-mereka yang berlatar belakang kejawaannya lebih kental namun politik di Indonesia sangat berpedoman pada falsafah politik Pancasila.²⁸

Berkenaan dengan kekuasaan ini, Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٦٥

Artinya: *Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs Al-An'am: 165).*

B. Komunikasi Politik

1. Pemahaman Ilmu Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah sebuah fase terdiri dari dua kata yaitu "komunikasi" dan "politik yang mempunyai makna dan pengertian tersendiri sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah digabungkan dua kata tersebut jadilah sebuah pengertian yang lebih luas, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli.

Mc Nair menyebutkan "Komunikasi politik membicarakan tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai. apakah itu nilai kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan undang-undang atau aturan, apakah itu legislatif maupun eksekutif, serta sanksi- sanksi apakah dalam bentuk hadiah atau denda."²⁹

²⁸Anwar Arifin, *Komunikasi Politik : paradigma, teori, aplikasi dan komunikasi politik Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hal. 190.

²⁹Brian Menair, *An Introduction to Political Communication*, dalam Hafied Canggara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: Raja wali Pers, 2009), hal. 36.

Komunikasi politik tidak berbeda dengan komunikasi pada umumnya. Perbedaan hanya terletak pada isi atau pesan yang dikandung dalam proses komunikasi tersebut yaitu pesan atau informasi politik. Komunikasi politik sendiri merupakan salah satu fungsi partai politik, yaitu menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa antara "penggabungan kepentingan" dan "perumusan kepentingan" untuk diperjuangkan menjadi *public policy*. Jadi bisa dipahami bahwa komunikasi politik ialah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan.

Onong Uchana Effendy dalam Kamus Komunikasi menyebutkan, "komunikasi politik adalah komunikasi yang dilakukan seseorang, sekelompok, orang atau suatu lembaga dalam rangka memperoleh kewenangan untuk membela rakyat, baik dalam peranannya dalam pejabat pemerintahan maupun sebagai anggota suatu badan yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah".³⁰

2. Bentuk-bentuk Komunikasi Politik

Komunikasi politik memiliki beberapa tujuan penting antara lain, untuk membentuk citra politik yang baik dalam masyarakat, menciptakan *public opinion* atau pendapat umum, dan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum serta untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik dalam segala segi kehidupan berbangsa, dan bermasyarakat.³¹

Terdapat berbagai macam bentuk komunikasi politik, namun bentuk-bentuk yang sudah biasa digunakan oleh para politikus adalah,

³⁰Onong Uchana, *Kamus Komunikasi: Teori dan Praktek*, (Bandung: Rosdakarya, 2005), hal. 277.

³¹Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 86.

a. Retorika politik.

Retorika berasal dari bahasa Yunani-*rhetorica*, yang berarti seni berbicara yang memang memiliki daya persuasi politik yang tinggi, dengan menggunakan bahasa lisan yang indah (irama, mimik, dan intonasi suara). Namun sebaliknya, retorika politik ini justru sangat berbahaya jika digunakan sebagai medium propaganda.³²

Oleh sebab itu orator selain harus memiliki pengetahuan mengenai kejiwaan, dan kehidupan sosial manusia, dengan tujuan untuk menarik dan mempengaruhi masyarakat. Berdasarkan ada tidaknya persiapan dalam berpidato, pada pidato politik dikenal empat jenis retorika

- 1) *Impromptu*, adalah jenis pidato yang diucapkan secara spontan tanpa persiapan sebelumnya.
- 2) *Memoriter*, merupakan pidato yang ditulis kemudian diingat atau dihafal kata demi kata untuk disampaikan kepada khalayak.
- 3) *Manuskrip*, yaitu sebuah pidato yang disiapkan khusus secara tertulis dengan naskah.
- 4) *Eksetempore*, ialah jenis pidato yang telah dipersiapkan sebelumnya berupa garis besar dan pokok-pokok penting penunjang pembahasan.³³

Didalam komunikasi politik, para orator politik atau politikus tidak hanya bertumpu pada salah satu jenis pidato atau retorika saja untuk mempengaruhi khalayak secara persuasif tetapi mereka harus mampu menguasai semua teknik retorika seperti yang telah disebutkan. Hal tersebut disebabkan penggunaan retorika

³²Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi-Aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Jakarta: Bahai Pustaka, 2003), hal .65.

³³Anwar Arfin, *Komunikasi Politik*....,hal. 66.

merupakan hal yang paling urgen dalam komunikasi politik untuk mempengaruhi pendapat masyarakat terhadap para politikus.

b. Agitasi politik

Agitasi banyak sekali digunakan sebagai salah satu bentuk komunikasi politik yang paling manjur atau mendapat tempat istimewa, namun sebaliknya, agitasi di negara demokrasi (Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Indonesia) sangat tidak disukai bahkan ditolak. Agitasi sendiri berasal dari bahasa Latin, *agritare* (bergerak, menggerakkan) atau dalam bahasa Inggris *agitation*. Agitasi adalah suatu upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan dan tulisan, dengan jalan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak.

c. Propaganda Politik

Propaganda (menyemaikan tunas suatu tanaman) adalah salah satu bentuk kegiatan yang sudah lama dalam bidang politik. Penggunaan propaganda politik secara intensif dalam politik adalah dilakukan oleh Hitler (NAZI) dalam perang dunia II, yaitu dengan melakukan kebohongan dengan cara menyebarkan ideologi NAZI (fasisme) untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya. Sebelumnya propaganda digunakan dalam bentuk kegiatan keagamaan (umat Katholik), yaitu pada 1622, Paus Gregorius XV membentuk suatu komisi kardinal yaitu *congregatione propaganda fide*, untuk menambahkan keimanan Kristiani.

Seperti yang dikemukakan Ellul, propaganda adalah suatu alat yang dipergunakan oleh sekelompok yang terorganisir untuk menjalankan individu-individu yang secara psikologis dimanipulasi dan digabungkan ke dalam suatu organisasi. Bagi Ellul (dan juga bagi sarjana-sarjana yang lain), perkembangan

kelompok itu terjadi secara serentak dengan perkembangan propaganda). Propaganda adalah suatu gejala kelompok yang eratkaitannya dengan “organisasi dan tindakan yang tanpa itu propaganda praktis tidak ada”. Prapaganda yang efektif,” demikian tulis Ellul “hanya dapat bekerja dalam suatu negara³⁴.

d. *Public Relations* Politik

Secara umum *public relations* dipahami sebagai suatu usaha penyampaian ideal atau pesan kepada masyarakat. Kemudian pengertian ini dikembang luas kan menjadi usaha-usaha untuk menciptakan dan menjaga hubungan yang harmonis dan menguntungkan. *Public Relations* tidak hanya digunakan sebagai salah satu bentuk politik, namun juga dipakai dalam komunikasi lain, seperti komunikasi bisnis dan lain-lain.

Public relations politik adalah bentuk kegiatan dalam melakukan hubungan dengan masyarakat secara jujur, terbuka, rasional dan timbal balik sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, yang di mulai dengan meciptakan rasa memiliki bagi masyarakat.

e. Kampanye Politik

Bentuk komunikasi ini yang paling menarik dan semarak dilakukan menjelang hari pemilihan kampanye politik. Kampanye politik termasuk bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari

³⁴Jacques Ellul, *Propaganda*, dalam Dan Nimmo ter. Tjun Suparman, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, (Bandung: Rosdakarya), hal. 125.

rakyat. Kampanye politik adalah penciptaan, penciptaan ulang, dan pengalihan lambang signifikan secara sinambung melalui komunikasi.³⁵

Ada berbagai macam jenis kampanye politik diantaranya sebagai berikut. *Pertama*, dengan menggunakan media massa atau disebut juga dengan istilah persuasif massa. Metode ini biasanya digunakan dalam bentuk “imbauan kepada massa. metode ini biasanya digunakan dalam bentuk” imbauan kepada massa dilakukan baik melalui hubungan tatap muka ataupun melalui jenis media perantara, yaitu media elektronik, media cetak, atau poster.”³⁶

Salah satu kampanye yang biasa digunakan adalah kampanye massa, yaitu kampanye politik yang ditujukan kepada massa atau orang banyak. Persuasi yang digunakan dalam penyampaian pesan politik melalui tatap muka secara langsung antara caleg dengan masyarakat dan dengan menggunakan media, baik cetak maupun elektronik.³⁷

Kedua, kampanye interpersonal adalah kampanye yang dilakukan terhadap diri sendiri atau lebih kepada sikap-sikap pribadi. Hal-hal yang biasanya “dilakukan oleh para kandidat berupa (atau istrinya, kerabat dekat, dan juru bicara utama) dalam setting yang relatif informal. Banyak kandidat yang bangun dini hari agar tiba jam 5.00 atau 6.00 pagi ketika terjadi pergantian giliran kerja disuatu pabrik agar dapat berjabat tangan dengan karyawan yang masuk dan pulang”.³⁸ Bentuk kampanye interpersonallainnya yang biasa dilakukan adalah

³⁵Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek, ter.* Tjun Sujarman (Bandung Rosdakarya), hal. 173.

³⁶Dan Nimno, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media...*, hal.195.

³⁷Jalaluddin Rahmad, *Nuansa-Nuansa Komunikasi*, (Bandung: Rosdakarya), hal.2.

³⁸Dan Nimno, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media...*, hal. 205.

“kampanye melalui kantor pemuka pendapat. Para kandidat membina iktikad baik tokoh-tokoh lokal, negara bagian, dan yang mempunyai nama nasional”.

Ketiga, kampanye organisasi. Didalam kampanye organisasi yang dilakukan adalah "mengarahkan anggota, dan memberikan tekanan kepada calon penjabat: serikat buruh, asosiasi perusahaan, kelompok agrikultur, organisasi hak sipil, *lobby* konsumen, pencinta lingkungan, dan lain-lain”³⁹. Hal tersebut semuanya dilakukan agar dukungan suara mengarah kepada kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu.

f. Lobi Politik

Kata lobi yang dikenal masyarakat adalah tempat para tamu menunggu ataupun berbincang di sebuah hotel. Kemudian istilah tersebut digunakan dalam dunia politik karena para politikus melakukan pembicaraan politik secara santai atau pun informal sehingga istilah lobi politik juga melekat pada suatu kegiatan politik yang sangat penting.

Lobi politik adalah pengaruh pribadi, dalam hal ini kompetensi, penguasaan masalah, jabatan dan kepribadian politikus sangatlah berpengaruh. Lobi politik merupakan gelanggang terpenting dalam pembicaraan politikus atau kader politik, pengaruh otoritas, konflik, dan konsensus.⁴⁰ Kecakapan pribadi dalam berinteraksi akan sangat mempengaruhi pencapaian misi dan juga program partai dalam mendapat dukungan masyarakat. Dengan adanya lobi politik maka akan mudah tercapainya tujuan yang dimaksud.

³⁹Dan Nimno, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media...*, hal. 206.

⁴⁰Anwar Arifin, *Komunikasi Politik Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 2003), hal. 86.

3. Fungsi Komunikasi Politik

Fungsi komunikasi politik adalah struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi, perspektif, dan ideal serta gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkan kembali sebagai bahan dalam penetapan kebijakan. Sebagaimana dikutip dalam buku Deddy Mulyana “ilmu komunikasi” William I. Golden mengkatagorikan fungsi komunikasi kepada empat jenis yaitu:⁴¹

a. Sebagai komunikasi sosial

Fungsi komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu sangatlah penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, dan menjalin hubungan dengan orang lain. Karena komunikasi merupakan hal yang urgensi dalam kehidupan manusia maka komunikasi menjadi media untuk melakukan interaksi dengan orang lain dan masyarakat luas guna untuk mencapai tujuan bersama, yaitu:

- 1) Pernyataan sitensis diri. Orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis. Inilah yang disebut dengan aktualisasi diri atau lebih dikenal dengan esistensi diri.
- 2) Pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberi orang lain kepada kita.
- 3) Untuk kelengkapan hidup. Karena manusia merupakan makhluk sosial jadi kita tidak dapat hidup sendiri untuk mempertahankan

⁴¹ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 23.

hidup. Kita perlu bantuan orang lain dan berkomunikasi dengan orang lain, untuk kebutuhan hidup.

b. Sebagai komunikasi ritual

Suatu komunitas yang sering mengadakan acara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang disebut para antropolog sebagai *Riset rites of passage*. Mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, dan lain-lain. Dalam acara seperti ini orang tersebut mengatakan kata-kata atau perilaku tertentu yang simbolik. Seperti berdoa, shalat, membaca kitab suci, naik haji, dan lainnya. Demi menunjukkan komitmen mereka terhadap sebuah kepercayaan ataupun jati diri mereka.

c. Sebagai komunikasi instrumen

Komunikasi instrumen mempunyai beberapa tujuan umum yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. Sebagai instrumen komunikasi tidak saja kita gunakan untuk menciptakan dan membangun hubungan namun kita juga akan menghancurkan tujuan pribadi dan pekerjaan, baik yang tujuannya jangka pendek ataupun jangka panjang.

Untuk jangka pendek misalnya untuk memperoleh pujian, menumbuhkan kesan yang baik, memperoleh simpati, empati, keuntungan material, ekonomi, dan politik, yang antara lain dapat di raih dengan pengolaan kesan (*impression management*) yakni taktik-taktik verbal dan non-verbal seperti berbicara sopan, mengobrol janji, menggunakan pakaian necis dan sebagainya. Yang pada dasarnya untuk menunjukkan kepada orang lain siapa diri kita yang kita inginkan.

Sementara jangka waktu panjang dapat diraih lewat keahlian komunikasi, misalnya keahlian dalam berbicara seperti berpidato, berunding, berbahasa asing atau pun keahlian menulis. Kedua tujuan jangka pendek dan jangka panjang tentu saja saling berkaitan dalam arti bahwa pengelolaan secara kumulatif dapat digunakan untuk mencapai tujuannya.

d. Sebagai Konsep Diri

Konsep diri merupakan pandangan kita mengenai diri kita, dan itu hanya bisa diperoleh melalui informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Selain itu konsep diri merupakan suatu bagian yang penting dalam setiap pembicaraan tentang kepribadian manusia. Konsep ini juga merupakan sifat yang lahir dari kepribadian manusia tanpa dan unsur-unsur yang bertujuan untuk menampakkan kepada orang lain atau pun disebabkan oleh sesuatu hal. Seperti, sifat yang murah senyum dan suka menolong orang lain.

Sedangkan politik pencitraan merupakan kebalikan dari pada konsep diri yaitu suatu sifat kepribadian manusia yang diciptakan dikarenakan sesuatu hal yang bertujuan untuk kepentingan individu atau suatu kelompok. Seperti, sifat dermawan yang calon wakil rakyat yang bertujuan untuk menampakkan kepada masyarakat akan kedermawaannya sehingga berdampak pada simpatinya masyarakat untuk memilih pada saat pemilihan.

4. Pesan-pesan Komunikasi Politik

a. Ragam Pesan Politik

Politisi, professional, atau warga Negara yang aktif, satu hal yang menonjolkannya sebagai komunikator politik adalah mereka berbicara politik.

Bagaimana pesan politik itu? David V.J Bell meyakini terdapat tiga jenis pesan yang mempunyai kepentingan politik yaitu: pesan kekuasaan; pesan pengaruh, dan pesan otoritas.

- 1) Pembicara kekuasaan merupakan pesan yang mempengaruhi orang lain dengan ancaman atau janji. Bentuknya yang khas adalah “jika anda melakukan X, saya akan melakukan Y.” kunci pesan kekuasaan adalah bahwa ‘saya’ mempunyai kemampuan untuk mendukung janji maupun ancaman (baca kekuasaan koersif).
- 2) Pesan pengaruh merupakan pesan yang mempengaruhi orang lain dengan nasihat, dorongan, permintaan, dan peringatan Bentuknya yang khas adalah “jika anda melakukan X, maka akan terjadi Y.” Kunci pesan pengaruh adalah bagaimana sipembicara berhasil memanipulasi persepsi atau pengharapan orang lain terhadap kemungkinan mendapat untung atau rugi.
- 3) Pesan otoritas adalah pemberian perintah. Bentuknya yang khas adalah “lakukan X” atau “dilarang melakukan X”. Yang dianggap sebagai penguasa yang sah adalah suara otoritas dan memiliki hak untuk dipatuhi.⁴²

b. Sifat Pesan Politik

- 1) Kegiatan simbolik: kata-kata dalam pesan politik.

Kegiatan simbolik terdiri atas orang-orang yang menyusun makna dan tanggapan bersama terhadap perwujudan lambang-lambang referensial dan

⁴²Rusdi Kantaprawira, *Sistem Politik di Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 77.

kondensasi dalam bentuk kata-kata, gambar, dan perilaku. Dengan mengatakan bahwa makna dan tanggapan itu berasal dari pengambilan peran bersama, kita meminta perhatian kepada orang untuk memainkan peran. Hal ini berlaku baik bagi lambang politik maupun bagi lambang jenis apapun.

Misalnya, orang yang pindah pekerjaan kepada jabatan politik tinggi (presiden, gubernur, anggota DPR, dsb.) akan menggunakan gelar dan kelengkapan kedudukan itu; lambang itu membantu membentuk kepercayaan, nilai, dan pengharapan sejumlah besar orang mengenai bagaimana mereka harus menanggapi jabatan itu.

Dengan merangsang orang untuk memberikan tanggapan dengan cara tertentu, untuk memainkan peran tertentu terhadap pemerintah (komunikator politik), dan untuk mengubah pikiran, perasaan, dan pengharapan mereka. Lambang-lambang signifikan memudahkan pembentukan opini publik. Sebagaimana lambang dari pesan politik, kata-kata, gambar, dan tindakan komunikator politik merupakan petunjuk bagi orang-orang bahwa mereka dapat mengharapkan sesama warga negara menanggapi lambang-lambang itu dengan cara tertentu yang sudah dapat diperkirakan.

2) Bahasa: permainan kata dalam pesan politik.

Bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang *pertama* tersusun dari kombinasi lambang-lambang signifikan (tanda dengan makna dan tanggapan bersama bagi orang-orang) di dalamnya *kedua* signifikansi itu lebih penting dari pada situasi langsung tempat bahasa itu digunakan, dan *ketiga* lambang-lambang

itu digabungkan menurut aturan-aturan tertentu.⁴³ Dalam konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama, yang merupakan instrumen pokok dalam menceritakan realitas.

Berger, Peter dan Thomas Luckman (dalam Ibnu Hamad, 2004) meyakini bahwa bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Dalam komunikasi politik penggunaan bahasa menentukan format narasi (dan makna) tertentu. Fiske(1990) dalam *Cultural and Communication Studies*, menambahkan bahwa penggunaan bahasa tertentu dengan demikian berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya.

Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya. Dari perspektif ini, bahasa bukan hanya mampu mencerminkan realitas, tetapi bahkan menciptakan realitas. Atas dasar itu, bahasa (pesan politik) bisa didayagunakan untuk kepentingan politik. Dalam kehidupan politik, para elit politik selalu berlomba menguasai wacana politik guna memperoleh dukungan massa. Kaum propagandis biasanya paling peduli dengan pengendalian opini publik.

3) Semiotika makna dan aturan permainan kata politik.

Pesan-pesan yang dihasilkan dari hasil pengaruh dari para peserta komunikasi banyak bentuknya dan menghasilkan berbagai makna, struktur, dan akibat. Studi tentang keragaman itu merupakan satu segi dari ilmu semiotika, yakni teori umum tentang tanda dan bahasa. Charles Morris (dalam Nimmo, 1989) menyatakan bahwa semiotika membahas keragaman bahasa dari tiga

⁴³Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, Dan Media...*,hal. 211.

perspektif: semantika (studi tentang makna); sintaktika (berurusan dengan kaidah dan struktur yang menghubungkan tanda-tanda satu sama lain); dan pragmatika (analisis penggunaan dan akibat permainan kata)⁴⁴

4) Pragmatika: penggunaan pesan politik.

- a) Meyakinkan dan membangkitkan massa: pesan politik untuk pencapaian material.
- b) Autoritas sosial: pesan politik untuk peningkatan situs
- c) Ungkapan personal: pesan politik untuk identitas
- d) Diskusi publik: pesan politik untuk pemberian informasi.

5. Teori-teori Komunikasi Politik

Teori dapat diartikan sebagai sejumlah gagasan yang status dan asalnya bervariasi dan dapat dipakai untuk menjelaskan dan menafsirkan fenomena.⁴⁵ Ada beberapa teori komunikasi politik yang dikenal didunia perpolitikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Teori jarum hipodermik

Teori ini dengan nama lain disebut teori peluru atau teori serbuk transmisi. Teori ini lahir atas anggapan bahwa media memiliki beberapa efek dan dampak keperkasaan yang luar biasa. Para penganut teori ini (misalnya, Wilbur Schramm) melebih lebihkan kemampuan medis sebagai sebuah kekuatan raksasa yang mampu mengendalikan orang lain.⁴⁶

⁴⁴Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, Dan Media...*,hal. 205.

⁴⁵Ardial *Komunikasi Politik* (Jakarta: PT Indek Permata Puri Media, 2010), hal. 139.

⁴⁶Anwar Arifin, *Komunikasi Politik...*,hal.28.

b. Teori kepala batu

Teori ini dilandasi pemahaman psikologi bahwa dalam diri individu, ada kemampuan untuk menyeleksi apa saja yang berasal dari luar dan tidak direspon begitu saja. Teori kepala batu menolak teori jarum suntik atau teori peluru dengan alasan jika suatu informasi ditembakkan dari suatu media, mengapa khalayak tidak berusaha berlindung untuk menghindari tembakan informasi itu? Masyarakat atau khalayak memiliki hak untuk memilah informasi yang mereka perlukan itu dan informasi yang tidak mereka perlukan. Kemampuan untuk menyeleksi informasi terdapat pada khalayak menurut perbedaan individu, persepsi, dan latar belakang budaya berbeda.

c. Teori kegunaan dan kepuasan

Teori ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz pada tahun 1974 lewat bukunya *The Use Mass Communication Perspective on Gratification Research*. Teori ini banyak berkaitan dengan sikap dan perilaku konsumen, bagaimana mereka menggunakan media untuk mencari informasi tentang apa yang mereka butuhkan. Dalam praktik politik teori ini banyak digunakan oleh para politisi. Misalnya bagaimana cara Bill Clinton mempelajari debat Kdiennedy ketika ingin tampil debat dengan Bush dalam pemilihan presiden Amerika 1992.

d. Teori lingkaran kesunyian

Teori ini diperkenalkan oleh Elizabeth Noelle Neuman, mantan jurnalis kemudian menjadi profesor pada salah satu institut publistik di Jerman. Teorinya banyak berkaitan dengan kekuatan media yang biasa membuat opini publik, tetapi dibalik itu ada opini yang bersifat laten berkembang ditingkat bawah

yang bersembunyi karena tidak sejalan dengan opini publik mayoritas yang bersifat manifes (nyata dipermukaan).

Opini publik yang tersembunyi dilingkar disebut opini yang berada dalam lingkaran keheningan (*the spiral of silence*). Menurut beberapa pengamat teori ini dibuat oleh Elizabeth N. Neuman tidak lepas dari pengalaman wartawan di zaman Nazi dimana Hitler sangat membenci orang Yahudi sehingga timbul pendapat umum laten yang tersembunyi ditingkat bawah karena rasa ketakutan.

e. Teori penanaman

Teori ini dibuat oleh suatu tim riset yang dipimpin oleh George Gerbner di *Annarberg School of communication, University of Pennsyvania* pada tahun 1980. Teori ini memberi kontribusi studi komunikasi dengan sebutan teori penanaman atau teori kultivasi (*cultivation theory*), Teori ini menggambarkan kehebatan televisi dalam menanamkan sesuatu kadalam jiwa penonton, kemudian terimplementasi dalam sikap dan perilaku mereka.

Misalnya kebiasaan televisi dalam menyiarkan berita atau film tentang kejahatan memberi pengaruh (tertanam) pada sikap dan perilaku penonton untuk tidak mau keluar pada malam hari tanpa ditemani orang lain

f. Teori agenda setting (*agenda setting theory*)

Teori agenda setting pertama kali diperkenalkan pada tahun 1973 oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw dari *Shool Jurnalisme. Usiversiy of North Carolina* lewat tulisanya *the agenda setting function of the mass media*. Kedua pakar ini tertarik untuk melihat apakah pendapat para pemilih mengenai

isu-isu yang dipandang sangat penting dibentuk oleh besarnya pemberitaan mengenai isu-isu tersebut.

Dari hasil riset itu McComb dan Shaws menemukan adanya korelasi yang signifikan antara isu yang diangkat dengan oleh media dengan isu yang dianggap penting oleh pemilih. Teori ini mengakui bahwa media memberi pengaruh terhadap khalayak dalam pemilihan presiden melalui penayangan berita, isu, dan citra, maupun penampilan kandidat itu sendiri.⁴⁷

C. Strategi Komunikasi Politik

Strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Maka dalam merumuskan/menyusun strategi komunikasi diperlukan perumusan yang jelas. Komunikasi proses yang rumit. Dalam rangka menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran atau taktik operasional komunikasi dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat.⁴⁸

Dalam sebuah partai politik ataupun organisasi politik sudah tentu mempunyai strategi yang akan dijalkannya dalam menghadapi sebuah pesta demokrasi, seperti halnya pilkada. Komunikasi politik yang merupakan salah satu fungsi dalam politik juga mempunyai strategi yang sangat berpengaruh terhadap hasil dari pesan-pesan politik yang disampaikan kepada masyarakat luas. Dari itu keberhasilan sebuah strategi komunikasi yang diterapkan oleh sebuah partai atau kelompok politik akan sangat berdampak kepada hasil dari penyelenggaraan umum.

⁴⁷Hafied Canggara, *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Strategi...*, hal. 119-124.

⁴⁸Onong Uchana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 35.

Strategi komunikasi politik merupakan panduan dari perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tujuan strategi komunikasi politik harus menunjukkan operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berubah sewaktu-waktu, bergantung pada situasi dan kondisi. Perencanaan/strategi komunikasi politik tidak hanya untuk mengetahui kemanaarah dari kegiatan komunikasi politik tetapi juga memenangkan dukungan masyarakat secara politik.

Strategi pada dasarnya adalah perencanaan (*Planning*) dan manajemen (*Management*) untuk mencapai sebuah tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang akan menunjukkan arah usaha, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.⁴⁹

Strategi Komunikasi Politik yang dimaksud disini adalah upaya dalam memenangkan pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh barat Daya 2017, pasangan Akmal Ibrahim dan Muslizar tersebut berhasil meraih kemenangan, Jika dilihat dari sosok seorang Akmal Ibrahim merupakan tokoh politik muda yang pernah menjabat bupati pada periode sebelum naiknya bupati Ir. Jufri Hasanuddin, MM.

Kegagalan Akmal Ibrahim dalam memenangkan pemilu pada periode sebelumnya tidak bisa dilepaskan dari kasus korupsi sengketa tanah yang menimpa dirinya. Hal ini membuat sebagian masyarakat hilang kepercayaannya. Bahkan mengalami berbagai dinamika dalam politiknya, Akmal Ibrahim dan tim pendukungnya. Menangnya pasangan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari strategi komunikasi politik yang digunakan oleh tim suksesnya baik dalam berkampanye

⁴⁹Onong Uchana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), hal. 32.

atau pun berinteraksi dengan masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah tersebut.

Dapat disimpulkan secara keseluruhan, partai politik membutuhkan suatu perencanaan strategi dalam melakukan hubungan dengan masyarakat upaya untuk menarik simpatisan dari masyarakat. Dalam perencanaan komunikasi politik ini menyangkut produk politik yang akan dibawa, pesan politik yang akan disampaikan, dan image yang akan dimunculkan.

Perencanaan/strategi perlu dilakukan agar partai politik dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan adanya perencanaan demikian akan terjadi disinerji dan konsistensi di antara visi dan misi atau pun program-program kerja yang akan dilakukan suatu partai politik dalam strategi komunikasi politiknya untuk meraih kemenangannya. Maka karena itu strategi tidak bisa di pisahkan dalam pilkada untuk memenangkan dan mencapai tujuannya.

Landasan atau langkah-langkah dalam menyusun strategi komunikasi politik untuk mendukung perencanaan program-program yang akan dilaksanakan di lapangan diantaranya adalah memantapkan elit politik atau politikus partai. Menurut pakar model komunikasi Lasswell, menyatakan bahwa: cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan: *Who Says What, In Which* kepada siapa, dengan Efek apa). Jawaban dari pertanyaan tersebut berupa unsur-unsur proses komunikasi, yaitu *Communication* (komunikasi), *Messege* (pesan), *Media* (media), *Receiver* (komunikasi/penerima), dan *Effect* (efek).

D. Pilkada

1. Pengertian Pilkada

Menurut bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Salah satu ciri negara demokratis adalah menggunakan rumus *rule of law* yaitu terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas.

Pemilihan umum dikenal dengan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat umum dalam hal memilih wakil-wakil mereka dilembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu Presiden dan Wakil Presiden maupun kepala daerah. Pemilihan umum pada negara demokrasi juga berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat.⁵⁰

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang sering disebut sebagai Pilkada menjadi bukan sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan. Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.⁵¹

Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah

⁵⁰UUD Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 hal.3.

⁵¹ Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, (Jakarta: Sofmedia, 2012), hal. 31.

Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 62 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Dasar 1945, memang tidak pernah menyebut mengenai pemilukada. Pada Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah”.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.⁵²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

⁵² Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*, (Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010), hal. 44.

selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

Menelaah esensi dari pemilukada merupakan pemilu, sehingga secara prosedural dan substansial merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pemilukada sebagaimana pemilu lainnya berhak untuk mendapatkan pengaturan khusus, sehingga dapat mencapai derajat akuntabilitas, serta kualitas demokrasinya dapat terpenuhi dengan baik. Pemilukada merupakan suatu instrumen penting bagi demokratisasi di level lokal atau daerah yang menjadi pilar bagi demokratisasi di tingkat nasional.

2. Sejarah Pemilu

Proses Pemilu pertama di Republik Indonesia adalah terjadi pada masa kepemimpinan Soekarno pada tahun 1955, kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Soeharto (1971-1997), kedua Pemilihan Umum (Pemilu) tersebut berdasarkan pada UUD 1945 yang pada saat itu belum tercantum kata-kata Pemilu di dalam UUD 1945, akan tetapi tidak ada pihak yang menolak pelaksanaan Pemilu pada masa tersebut karena masih berdasarkan pendapat banyak ahli hukum tata negara yang menyarankan agar pelaksanaan Pemilu tetap dijalankan, meskipun kata-kata Pemilu belum tentu tercantum di dalam UUD 1945.⁵³

Pasca pemilu yang berlangsung pada tahun 1999. Rakyat kemudian menjadi saksi dari dinamika politik yang terjadi di negara Indonesia. Moral dan kinerja sebagian dari pemimpin yang terpilih pada pemilu tersebut baik yang duduk di

⁵³Topo Santoso & Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta Utara: PT. Grafindo Persada: 2004), hal. 1.

Legilastif maupun Eksekutif, ternyata jauh dari apa yang diharapkan oleh rakyat. Fakta ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan di hati rakyat akan tetapi juga menumbuhkan rasa acuh tak acuh sebagian masyarakat terhadap pemilu berikutnya, sehingga pada Pemilu tahun 2004 menjadi titik yang sangat krusial terhadap reformasi dan demokrasi politik di Indonesia ke depan. Akankah rakyat Indonesia masih percaya terhadap Pemilu tahun 2004 yang dapat melahirkan pemimpin berkualitas, atau tidak ada bedanya dengan hasil pemilu 1999 yang ternyata “jauh panggang dari api” Ada 5 faktor yang membuat rakyat sangat antusias dalam menghadapi pemilu 2004.⁵⁴

- a. Sebagian rakyat masih merasakan pemilu sebagai fenomena budaya dari pada fenomena politik, sehingga setiap “pesta demokrasi’ datang, rakyat menyambutnya dengan senang hati.
- b. Ini pertama kali dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga rakyat tertarik untuk merasakannya.
- c. Sistem pemilu kali ini bersifat terbuka meski sangat terbatas, sehingga rakyat tentang untuk memilih orang yang dipercayainya.
- d. Untuk pertama kalinya juga rakyat dipersilahkan untuk memilih calon-calon perseorangan untuk mewakili daerah (DPD).
- e. Keharusan partai peserta pemilu untuk menampilkan sedikitnya 30% calon perempuan.

⁵⁴Topo Santoso & Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal.....*, hal 26

3. Pilkada Aceh 2017

Pilkada serentak yang dilaksanakan pada Februari 2017, menjadi tahun pesta demokrasi bagi rakyat Aceh karena pada tahun ini rakyat dapat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati secara langsung. Pilkada Aceh pada tahun 2017 merupakan ajang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang bertujuan untuk menentukan Bupati dan Wakil bupati periode 2017-2022.

Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka memilih calon pemimpinnya melalui pemilihan umum Bupati juga sudah berlangsung sejak tahun 2004-2005. Pemilu secara langsung yang melibatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya bahkan berlangsung hingga tahun 2017. Pilkada serentak yang diadakan di tahun 2017 dilaksanakan pada februari 2017 yang bertujuan untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2017–2022.

Jadi terlihat jelas bahwa keterlibatan masyarakat dalam Pilkada tahun 2017 ini bukanlah menjadi suatu hal yang baru dalam kehidupan berpolitik masyarakat setempat, untuk memenangkan calon Bupati/ Wakil Bupati pasti perlu menggunakan strategi komunikasi politik untuk menarik perhatian agar tercapai ketujuan yang diinginkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi, demikian juga dengan penelitian ini diperlukan metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah yang ingin diteliti. Untuk menyelesaikan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang paling dasar, yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, sesuai dengan kenyataan kehidupan manusia apa adanya.¹

A. Rancangan Penelitian

1. Metode pengkajian yang digunakan

Dalam sebuah riset (penelitian), metode sangat berpengaruh dalam menentukan sistematis dan keefektifan pada penelitian yang dilakukan, khususnya dalam membuat sebuah karya ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data lapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari data tersebut agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terprogram.²

Hal ini juga sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Mohd. Nazir yang menyatakan bahwa: Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti sesuatu kondisi, suatu pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang ini, yang

¹ Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hal. 73

² Suhasrimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipt, 1993), hal. 160.

bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³

Penggunaan metode analisis deskriptif ini sangat berkaitan dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi strategi atau peristiwa yang telah berlangsung pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2017 silam dengan mengungkap kembali penggambaran sebuah informasi. Proses penelitian yang penulis lakukan juga melibatkan berbagai pihak yang berkaitan erat dengan pilkada pada tahun 2017 tentang Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Operasional Variabel

Strategi komunikasi politik sangat penting dalam setiap menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk tercapainya suatu keberhasilan. Strategi merupakan hal yang sangat penting dimana strategi diposisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan sehingga misi dari suatu tujuan dapat tercapai. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya saja menunjukkan arah jalan saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.⁴

Komunikasi politik ialah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan. Dalam “kamus komunikasi” disebutkan bahwa komunikasi politik

³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1985), hal. 65.

⁴ Onong Uchana Effendi, *Dimensi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 29.

adalah komunikasi yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, atau lembaga dalam rangka upaya memperoleh kewenangan untuk membela rakyat, baik dalam hal peranannya dalam pejabat pemerintah maupun sebagai anggota suatu badan yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan pemerintahan.⁵

Selain itu komunikasi politik juga didefinisikan sebagai transmisi informasi yang relevan secara politis dari suatu bagian sistem politik kepada bagian sistem politik yang lain. Jadi dapat dinyatakan bahwa komunikasi politik adalah usaha seseorang atau suatu kelompok politik berupa aktor-aktor politik yang membawa pesan atau isi politik untuk kepentingan masyarakat luas yang berkaitan dengan pemerintahan, kekuasaan, dan kebijakan-kebijakannya.

Sedangkan strategi komunikasi politik yang dimaksud dalam penulisan karya ilmiah ini adalah usaha kandidat dan tim pemenangan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Aceh Barat Daya dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada masyarakat. Pemilihan umum Pilkada (pemilukada) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian karya tulis ilmiah ini yaitu kabupaten Aceh Barat Daya tentang penggambaran (deskriptif) strategi atau peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sejak dimulainya pesta demokrasi proses deskripsi penetapan calon hingga proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Aceh Barat

⁵ Onong Uchana Effendi, *Kamus Komunikasi...*, hal. 277.

⁶ UUD *Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007* tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 hal. 3.

Daya sehingga dengan semua bentuk dan hal yang berkaitan dengan proses pilkada yang di selenggarakan pihak KIP sejak Januari hingga Februari tahun 2017 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang di perlukan dari sumber yang jelas, penulis menetapkan kabupaten Aceh Barat Daya khususnya instansi yang berkaitan erat dengan pilkada di Aceh Barat Daya seperti KIP, instansi politik dan lainnya sebagai lokasi penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2018.

Penulis lebih memfokuskan lokasi penelitian pada KIP atau instansi politik lainnya dengan alasan agar sesuai berdasarkan latar belakang dan tujuan proses penelitian ini dilaksanakan sebagaimana kita ketahui bahwa KIP merupakan instansi resmi pemerintah yang menyelenggarakan, mengawasi dan mengatur semua perihal yang berkaitan dengan pemilu atau pilkada baik itu pemilihan dalam konteks negara seperti Presiden hingga pemilihan yang dalam konteks daerah seperti pemilihan Bupati/Wakil Kota atau sejenisnya.

KIP yang merupakan instansi pemerintah dibidang Pilkada dan juga mempunyai tugas sebagai penyelenggara proses Pilkada Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 di Kabupaten Aceh Barat Daya sudah tentu mempunyai semua data-data yang di perlukan dalam proses penelitian karya ilmiah ini, sehingga mempermudah penulis untuk melengkapi semua data yang diperlukan untuk mengolah data dari hasil penelitian yang dilakukan.

C. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi Objek dalam penulis karya ilmiah ini adalah segala bentuk strategi-strategi atau peristiwa yang terjadi pada proses pemenangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 di kabupaten Aceh Barat Daya dipilih sebagai objek penelitian karena pada proses demokrasi ini banyak peristiwa atau strategi politik yang terjadi dimulai dari proses penyaringan calon, hingga proses pemenangan.

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis perlu melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu dengan mencari data yang diperlukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi tanpa menggunakan teknik observasi. Penulis tidak menggunakan teknik observasi karena dalam proses penelitian ini data yang diambil adalah deskriptif tentang strategi atau peristiwa yang telah terjadi sebelum penelitian dilakukan.

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sangat berkaitan erat dengan segala bentuk peristiwa atau strategi yang terjadi, sehingga teknik pengumpulan data dari dokumentasi dan wawancara menjadi teknik yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam proses penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif adalah hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti pengamatan,

wawancara, menggambar, diskusi kelompok terfokus, dan lain-lain. Semua data dan informasi yang diperoleh dan dianalisis.⁷

Adapun proses pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat analisis deskriptif tentang strategi-strategi yang terjadi pada pemenangan Bupati dan Wakil Bupati dikabupaten Aceh Barat Daya. Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan semua peristiwa Pilkada di Aceh Barat Daya dengan mengambil data pada KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya:

1. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data tentang daftar segala peristiwa. Dalam metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data yang dimiliki lembaga dan peneliti memformulasikan untuk menyusun dalam bentuk laporan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Tujuan dari penggunaan bahan dokumen dalam penelitian ini yaitu untuk melukiskan secara umum bagaimana strategi yang dilakukan dan sejauh mana pengaruh strategi yang telah terjadi pada pemenangan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 di Kabupaten Aceh Barat Daya . selain itu penulis juga akan melakukan pengumpulan data tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada

⁷Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.91.

Pilkada tersebut dengan mengambil data ataupun gambar-gambar langsung pada KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Wawancara

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung dua arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁸ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Metode ini dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan pihak yang terkait dengan proses Pilkada Aceh Barat Daya seperti KIP, instansi politik lokal, hingga tim pemenangan yang berdomisili di Aceh Barat Daya yang terlibat langsung pada pemenangan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 di kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun proses wawancara dilakukan dengan cara *face to face* (tatap muka) serta mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan.

Wawancara yang merupakan alat untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya akan dilakukan dengan cara terbuka, bebas, dan tidak terlepas dari permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu wawancara juga menjadi alat untuk penjelasan tentang informasi yang telah didapatkan untuk menindak Injuti informasi dalam penelitian yang dilakukan.

⁸ Abdurrahman Fathori, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 105.

Dalam proses wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi, penulis mewawancarai beberapa responden yang berkaitan erat dengan proses pemengangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya yang menjabat pada saat Pilkada dilaksanakan, sekretaris KIP, anggotanya, para pakar politik yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, serta instansi-instansi yang berkaitan erat dengan proses Pemenangan Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis mengolah data yang berasal dari hasil wawancara dengan menggunakan teknik analisis data berdasarkan hasil wawancara. Artinya, setiap data dari hasil wawancara dimasukkan kedalam penelitian seadanya, kemudian mengambil beberapa kesimpulan serta memberi saran-saran yang bersifat membantu penyempurnaan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul penulis menggunakan metode kualitatif. yaitu untuk menganalisis data atau jawaban yang telah diperoleh dari narasumber atau responden tentang permasalahan yang berkaitan langsung dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dengan demikian, teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan data lainnya yang berkaitan langsung dengan hal yang diteliti, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.⁹

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Profil Lembaga

1. Profil Kabupaten Aceh Barat Daya

Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) ibu kota Blangpidie merupakan sebuah kabupaten diprovinsi Aceh, Indonesia. ABDYA diresmikan Tanggal 10 April 2002 (hari jadi), Sebagai kabupaten otonom yang terpisah dari Kabupaten Aceh Selatan selaku kabupaten induknya, melalui UU No.4 tahun 2002. Kabupaten ini dibatasi oleh Gayo Lues di utara, Aceh Selatan dan Samudera Hindia di selatan, Nagan Raya di barat dan Gayo Lues di timur.

Wilayah ini termasuk dalam gugusan pegunungan Bukit Barisan Aceh Barat Daya yang merupakan pemekaran dari kabupaten induk, yaitu Aceh Selatan karena sudah sepantasnyalah, ABDYA menjadi sebuah kabupaten yang otonom karena dari segi kepadatan penduduk, dan segi geografis, ABDYA sudah saat nya untuk berdiri sendiri untuk membentuk suatu kabupaten yang otonom bukan semudah membalikkan telapak tangan butuh perjuangan dari seseorang yang telah mengorbankan daya dan upaya sehingga ABDYA menjadi sebuah kabupaten yang resmi dari segi hukum dan otonom dan bukanlah merupakan eksekusi dari reformasi pada tahun 1998 semata.

Meskipun perubahan dipemerintahan saat itu mempercepat pemekaran tersebut, namun wacana untuk pemekaran itu sendiri sudah berkembang sejak sekitar tahun 1960-an. Sepantasnyalah berterima kasih yang sebesar besarnya kepada pendahulu yang mungkin sekarang sudah terlupakan situsnyalah. Abdya

dikelilingi oleh laut dan gunung luas wilayah 2.334,01km² jumlah penduduk 122.875 jiwa dan punya Motto: “Sapeu Kheun Sahoe Langkah”.

Kalau mau ke Aceh Selatan dari Banda Aceh pasti akan jumpa dengan Kabupaten Abdya, dulu saja banyak orang salah paham yang mana ibu kota Aceh Selatan, orang bingung kerana Abdya sangat pesat dan maju dalam bidang perdagangan tidak salah sebuah lagu yang di tuliskan oleh Bob Rizal, “*Naksu Mita Peng Jak U Blangpidie naksu Meutani U Geunang Jaya*” (jadi. Kalo mau cari uang datang ke Blangpidie kalau mau bertani datang ke Geunang Jaya (salah satu kampung di Kecamatan Babahrot), sangking indahny lirik lagu tersebut yang pernah hit dimasanya dulu, banyak sekali peminat lagu tersebut. Itulah sepotong kalimat yang terselip dalam lagu dengan judul Aceh Selatan.

Dari situ saja, kita sudah dapat membayangkan bagaimana kota Blangpidie itu sebelum jadi Kabupaten Abdya. Yang bakalan Maju dan tumbuh pesat karena didorong oleh banyaknya komoditi eksport yang bisa dikembangkan salah satu contoh Pala, Sawit, Karet, Coklat dan bahkan berbagai macam hasil bumi sudah di temukan seperti: Minyak tanah di pesisir pantai Pulau Kayu Susoh, Emas dan bijih besi di Alue Sungai Pinang, juga di Ie Mirah.

Abdya dikepalai oleh seorang Bupati defenitif yaitu Bupati baru Ir. Jufri Hasanuddin, MM yang dilantik oleh gubernur Aceh DR. Zaini Abdullah Bupati, yang menggantikan Akmal Ibrahim, SH, yang sebelumnya dipimpin oleh Pejabat Bupati Drs. H. Azwar Umri menggantikan Drs. H. Tgk. T. Burhanuddin Sampe, MM yang sebelumnya di jabat oleh Alm. Nasir Hasan yang menggantikan

Baharuddin, S.Sos, MM sebagai Bupati perdana yang dilantik gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Ir. H. Azwar Abubakar tanggal 18 Pebruari 2006.

Bupati yang sekarang adalah Ir. Jufri Hasanuddin, MM., sebagai Bupati definitif hasil Pilkada masa bakti 2012-2017. Aceh Barat Daya mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan untuk kelangsungan perekonomiannya. Hal ini ditunjang dengan posisinya yang sangat strategis di jalur dagang kawasan barat Aceh, khususnya kota Blangpidie yang sejak dulu menjadi pusat perdagangan di pantai barat Aceh.

Sebenarnya bila kondisi keamanan semakin membaik, banyak sekali potensi yang dapat digali dikawasan ini, seperti pariwisata, karena posisinya yang merupakan panduan antara pantai Samudera Hindia dan Bukit Barisan yang hijau. Selain itu Aceh Barat Daya dapat dikembangkan sebagai kawasan agroindustri, agribisnis dan peternakan terpadu serta sektor lain yang akan berkembang. Aceh Barat Daya mencakup wilayah kecamatan sebagai berikut:

- a. Babah Rot
- b. Blangpidie
- c. Jeumpa
- d. Kuala Batee
- e. Lembah Sabil
- f. Manggeng
- g. Setia
- h. Susoh

i. Tangan-Tangan

2. Profil Calon Bupati Akmal Ibrahim dan Muslizar MT.

Akmal Ibrahim, S.H lahir di Aceh Selatan 12 Maret 1965. Mantan Bupati Aceh Barat Daya periode 2007-2012 ini kembali mencalonkan diri sebagai bupati Aceh Barat Daya berpasangan dengan Muslizar.MT dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Barat Daya tahun 2017.

Muslizar MT lahir di Blang Padang, 05 Mei 1973. Mantan kepala Baitul Mal dan anggota DPRK Aceh Barat Daya ini mencalonkan diri sebagai wakil bupati Aceh Barat Daya berpasangan dengan Akmal Ibrahim,S.H dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Barat Daya tahun 2017.

3. Visi dan Misi

Visi: “Bersama kita wujudkan Aceh Barat Daya yang sejahtera dan islami”

Misi:

- a. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam tatanan kehidupan masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan islam.
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi biroksi serta pelayanan public berbasis teknologi informasi.
- c. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor rill pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan menengah, serta memfasilitasi berdirinya lembaga keuangan mikro syariah.
- d. menciptakan peluang kerja baru melalui pemamfatan potensi daerah yang berbasis kearifan lokal.

- e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah sebagai akses percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan dukungan maksimal terhadap pendidikan formal dan informal.
- g. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Aceh Barat Daya yang sehat.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan melalui pemenuhan kebutuhan sosial.
- i. Meningkatkan kreatifitas kepemudaan dan kebijakan yang responsive gender.

4. Payung Hukum Penyelenggaraan Pilkada 2017

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), pasal 18 ayat (4) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- b. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.
- 2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.
- 3) Undang-Undang nomor 1 tahun 20014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemelihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

5. Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017

No	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
PERSIAPAN			
1	Pemberitahuan DPRK Aceh Barat Daya Kepada KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Mengenai Berakhirnya Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya		1 Juni 2016
2	Perencanaan Program dan Anggaran		22 Mei 2016
3	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		22 Mei 2016
4	Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaran Pemilihan		31 Juli 2016
5	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	30 April 2016	14 Februari 2017
6	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 November 2016	14 Januari 2017
7	Pemantauan Pemilihan		
	Pendaftaran pemantauan pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
8	Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan-Pemilihan (DP4)		
	a. Penerimaan DAK2 dari pemerintah sebagai dasar perhitungan jumlah minimum syarat dukungan pasangan calon perseorangan	16 Mei 2016	16 Mei 2016
	b. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	c. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016

	d. Sinkronisasi DP4 dengan daftar pemilih Pemilu / Pemilihan terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	e. Penyampaian hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi kepada KIP Kabupaten/ Kota	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	f. Pengumuman hasil analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih		
	a. Penyusunan daftar pemilih oleh KIP Kabupaten /Kota dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	07 September 2016
	b. Pemutakhiran		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	06 Agustus 2016	05 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	08 September 2016	07 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	08 Oktober 2016	21 Oktober 2016
9	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat gampong atau nama lain dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KIP Kabupaten/Kota	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/ kota untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS)	27 Oktober 2016	02 November 2016
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	03 November 2016	09 November 2016
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 November 2016	19 November 2016
	9) Perbaikan DPS	20 November 2016	24 November 2016
	10) Rekapitulasi DPS Hasil perbaikan tingkat gampong atau nama lain dan penyampainya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 November 2016	27 November 2016

	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampainya kepada KIP kabupaten/kota.	28 November 2016	29 November 2016
	12) Penyampain rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat gampong atau nama lain dan DPS hasil perbaikan kepada KIP kabupaten/kota.	28 November 2016	29 November 2016
	13) Daftar pemilih tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	30 November 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	14) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1):		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	18 Desember 2016	24 Desember 2016
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat gampong atau nama lain dan penyampiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	27 Desember 2016	29 Desember 2016
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	30 Desember 2016	2 Januari 2017
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten/kota	3 Januari 2017	4 Januari 2017
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	5 Januari 2017	14 Januari 2017
	f) pengumuman DPTb-1 oleh PPS	14 Januari 2017	15 Februari 2017
10	Penyelenggaraan Syarat dukungan pasangan calon perseorangan		
	a. Penerimaan DAK2 dari KIP Aceh	16 Mei 2016	21 Mei 2016
	b. Penetapan jumlah minimal dukungan calon perseorangan	22 Mei 2016	2 Mei 2016

	c. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya:		
	1) Penyerahan syarat dukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Barat Daya kepada KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	3) Analisis dukungan ganda	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	e. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Barat Daya kepada PPS melalui PPK.	16 Agustus 2016	
	f. Penelitian administrasi dan factual di tingkat gampong atau nama lain	21 Agustus 2016	3 September 2016
	g. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	4 September 2016	10 September 2016
	h. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	11 September 2016	15 September 2016
11	Pendaftaran Pasangan Calon		
	a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon	11 September 2016	18 September 2016
	b. Pendaftaran pasangan calon	19 September 2016	21 September 2016
	c. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang di ajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik.	19 September 2016	21 September 2016
	d. Pemeriksaan kesehatan	19 September 2016	25 September 2016
	e. Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman KIP Aceh Barat Daya untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	21 September 2016	27 September 2016
		21 September 2016	27 September 2016
	f. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	21 September 2016	27 September 2016
	g. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	25 September 2016	26 September 2016

h. Uji mampu baca Al Quran	21 September 2016	27 September 2016
i. Pemberitahuan hasil penelitian	27 September 2016	28 September 2016
j. Perbaiki syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
1) Perbaiki syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya.	29 September 2016	1 Oktober 2016
2) Perbaiki syarat calon dari Partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan.	29 September 2016	1 Oktober 2016
l. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di laman KIP kabupaten Aceh Barat Daya untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
m. Penelitian hasil perbaikan:		
1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya:		
a) penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	6 Oktober 2016
b) Analisis dukungan ganda	29 September 2016	6 Oktober 2016
c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya kepada PPS melalui PPK	7 Oktober 2016	8 Oktober 2016
d) Penelitian administrasi dan factual di tingkat gampong atau nama lain	9 Oktober 2016	15 Oktober 2016
e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	16 Oktober 2016	17 Oktober 2016
f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten/kota	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
2) Penelitian perbaikan syarat calon	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
n. Penetapan pasangan calon	22 Oktober 2016	22 Oktober 2016

	o. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	23 Oktober 2016	23 Oktober 2016
	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
12	a. Pengajuan permohonan sengketa di panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	b. Perbaikan permohonan sengketa	25 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	c. penyelesaian sengketa dan putusan	28 Oktober 2016	8 November 2016
	d. pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	9 November 2016	11 November 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 November 2016	14 November 2016
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	15 November 2016	5 Desember 2016
	g. KIP Kabupaten Aceh Barat Daya wajib menindak lanjuti putusan PT TUN	6 Desember 2016	8 Desember 2016
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	5 Desember 2016	14 Desember 2016
	i. MA memeriksa dan memutuskan perkara kasasi	15 Desember 2016	16 Januari 2017
	j. KIP Kabupaten Aceh Barat Daya wajib menindak lanjuti putusan MA	17 Januari 2017	19 Januari 2017
	KAMPANYE		
13	a. Kampanye	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Penyampaian Visi, Misi dan program dalam rapat paripurna DPRK Aceh Barat Daya	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	c. Debat public/terbuka antar pasangan calon	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	d. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	e. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 February 2017	14 February 2017
	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
14	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LPSDK)	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan LPSDK	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	c. Penyerahan laporan penerimaan	19 Desember	19 Desember

	sumbangan dana kampanye (LPSDK)	2016	2016
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	e. Penyerahan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPSDK)	12 Februari 2017	12 February 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada kantor akuntan public (KAP)	13 February 2017	13 February 2017
	g. Audit LPPDK	13 February 2017	27 February 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KIP Aceh Barat Daya	28 February 2017	28 February 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	1 Maret 2017	1 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil	1 Maret 2017	3 Maret 2017
15	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 November 2016	22 January 2017
	b. produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 November 2016	14 February 2017
16	Pemungutan dan Penghitungan		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 February 2017	12 February 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 February 2017	15 February 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 February 2017	21 February 2017
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 February 2017	15 February 2017
	e. pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di gampong atau nama lain	15 February 2017	21 February 2017
17	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 February 2017	17 February 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan	16 February 2017	22 February 2017

	penyampaian hasil rekapitulasi ke KIP kabupaten Aceh Barat Daya		
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya	22 February 2017	24 February 2017
18	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHOHAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Terpilih	8 Maret 2017	10 maret 2017
19	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam peraturan Mahkamah Konstitusi	
20	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan mahkamah konstitusi dibacakan.	
	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Terpilih		
21	a. Tidak ada pemohonan PHP	9 maret 2017	11 Maret 2017
	b. Pemohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Terpilih		
22	a. Tidak ada permohonan PHP	12 maret 2017	12 juni 2017
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b	

Sumber: Buku data dan infografik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat daya 2017

6. Data Pemilihan Pilkada 2017

Nama Kecamatan	Jumlah Kec/PPK	Jumlah Desa/PPS	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
Babahrot	1	7	37	7.079	6.810	13.889
Kuala Batee	1	18	40	7.290	7.444	14.734
Jeumpa	1	10	18	3.755	3.859	7.614
Susoh	1	28	40	8.087	8.308	16.395
Blangpidie	1	19	34	7.590	8.081	15.671
Setia	1	6	13	2.993	2.987	5.980
Tangan-Tangan	1	15	23	4.829	4.749	9.578
Manggeng	1	17	27	5.502	5.522	11.024
Lembah Sabil	1	12	18	3.629	3.824	7.453
Total	9	132	250	50.754	51.584	102.338

Sumber: Buku data dan infografik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat daya 2017

7. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

Laki-laki	Kecamatan	Perempuan
7.079	Babahrot	6.810
7.290	Kuala Batee	7.444
3.755	Jeumpa	3.859
8.087	Susoh	8.308
7.590	Blangpidie	8.081
2.993	Setia	2.987
4.829	Tangan-Tangan	4.749
5.502	Manggeng	5.522
3.629	Lembah Sabil	3.824

Sumber: Buku data dan infografik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat daya 2017

B. Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017

Dalam sebuah wilayah yang besar seperti kabupaten, membutuhkan pemimpin dan wakilnya untuk menjalankan amanah rakyat luas. Orang-orang intelek dalam bidangnya masing-masing dicalonkan atau mencalonkan dirinya sendiri demi sebuah jabatan yang sangat berat yakni wakil rakyat. Sering kali

pekerjaan wakil rakyat hanya dipandang sebelah mata demi kedudukan, uang dan gengsi semata, bukan untuk mengabdikan dan mengayomi rakyatnya. Yang sebenarnya pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang berat dalam tanggung jawabnya.

Komunikasi merupakan interaksi dan share informasi maupun berita pada khalayak sebagai news. Dalam kaitan politik sendiri bermakna berkuasa, menguasai dan mengkafer rakyat maupun pengikutnya agar ikut ataupun memahami paham mereka. Hal ini berarti mempunyai makna menginformasi dan mempengaruhi masa. Terkadang para politikus bermain politik dengan cara yang curang dan cenderung menghalalkan segala cara, hal ini bertentangan dengan tata cara dan etika berkampanye, misalnya politikus yang berkampanye menggunakan uang sebagai pelaris mereka atau disebut juga *money politic*.

Meskipun demikian, pasangan calon bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim, SH dan pasangannya Muslizar MT, melakukan komunikasi politik dengan strategi yang dikategorikan sangat baik. Penggunaan bahasa yang merakyat dan menguasai media menjadi andalan pasangan nomor urut 1 ini dalam menguasai suara rakyat. Bahasa yang merakyat sering dilakukan pasangan ini dalam menelusuri ke dalam perkampungan warga, berbincang dan mendengarkan keluhan rakyat menjadi strategi yang sangat dikuasai oleh pasangan tersebut.¹

Selain itu, ada beberapa media online yang juga ikut dikuasai oleh pasangan yang mengusung slogan “kembalikan harapan rakyat” ini. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh mereka selalu di posting ke media guna untuk

¹Hasil wawancara dengan Bapak Adam Malik Ketua Tim Sukses calon Bupati Aceh Barat Daya periode 2017-2022 Periode Akmal Ibrahim & Muslizar MT pada tanggal 16 Februari 2018

memberitakan kepada seluruh masyarakat tentang kunjungan dan kegiatan mereka.² Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Akmal Ibrahim yang menjadi calon kuat Bupati Aceh Barat Daya periode 2017-2022.

Dalam menghadapi pilkada, lebih menggunakan strategi komunikasi politik yang bercorak dakwah. Corak dakwah yang dimaksud adalah dengan melakukan pengajian seperti yasinan bersama tim dan warga gampong yang dituju, melakukan tausiyah dan santunan anak yatim. Strategi pemenangan pemilukada kali ini dilakukan dalam bentuk empat tahapan aksi; pertama, mendengar; kedua, mengajak; ketiga, bicara; dan keempat, menang. Keempat tahapan aksi ini diterapkan pada tahun pemenangan pilkada menjelang pilkada 2017.

Dalam menjalankan empat tahapan aksi pemenangan pilkada tersebut, tim pemenangan pasangan Akmal Ibrahim, SH dan Muslizar MT menggunakan strategi komunikasi politik dengan pendekatan komunikasi interpersonal, dilakukan dengan cara bertatap muka perorang yang dituju dengan maksud melakukan promosi dan mengharap dukungan kepada Akmal Ibrahim dan Muslizar. Komunikasi publik, dilakukan dengan cara duduk bersama warga dan berkampanye dengan menceritakan program Akmal Ibrahim dan Muslizar. Sedangkan komunikasi massa dilakukan dengan media massaseperti berita online, facebook, koran spanduk dan lain-lain untuk menampilkan sosok Akmal Ibrahim dan Muslizar MT. Peran media pada pemilukada legislatif 2017 sangatlah penting, sehingga hampir semua calon menggunakannya. Bentuk-bentuk komunikasi

²Hasil wawancara dengan Bapak Tgk. Fajriyal Ketua Partai PDA, partai yang mengusung calon Bupati Aceh Barat Daya Periode 2017-2022 Akmal Ibrahim, SH & Muslizar MT pada tanggal 13Februari 2018

politik dalam media massa ini bisa berupa iklan, press release, dan dialog interaktif.³ Bila melihat strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Akmal Ibrahim dan Muslizar MT, maka teori ini tidak jauh berbeda dengan model teori yang dikemukakan oleh Lasswell: Pembicara – pesan – media – pendengar – pengaruh.⁴

Dihal ini, Lasswell melihat bahwa suatu proses komunikasi selalu mempunyai efek atau pengaruh. Karena itu tidak mengherankan kalau model Lasswell ini banyak menstimulasi riset komunikasi, khususnya di bidang komunikasi massa dan komunikasi politik. Umumnya model ini terlalu menekankan pengaruh pada khalayak, sehingga mengabaikan faktor tanggapan balik.

Penggunaan metode ini dirasakan sangat efektif, dimana hasil yang di peroleh oleh pasangat ini sangat tinggi dibandingkan lawan beratnya pasangan nomor urut 6 pasangan Mukhlis Muhti, MA dan Hj. Syamsinar. Perolehan suara Akmal Ibrahim dan Muslizar MT sebanyak 28.183 suara atau 35.44%, sedangkan pasangan Mukhlis Muhti, MA dan Hj. Syamsinar sebanyak 20.334 suara atau 25.57%.⁵ ini menunjukkan bahwa begitu dominannya pasangan Akmal Ibrahim dan Muslizar MT, pada peregelaran pemilu kepala daerah tahun 2017.

Akmal Ibrahim yang telah pernah menjabat sebagai Bupati Aceh Barat Daya pada periode 2007-2012 merasa sangat berpengalaman dalam hal menjadi

³Hasil wawancara dengan Bapak Akmal Ibrahim, SH calon Bupati Aceh Barat Daya Periode 2017-2022 pada tanggal 15 Februari 2018

⁴Hafied Canggara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 42

⁵Buku Data dan Infografik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, hal. 72

calon bupati Aceh Barat Daya, komunikasi politiknya pun sangat penting dalam memperoleh kemenangan pada pilkada tahun 2017 ini. Menurutnya, komunikasi politik sangat penting karena strategi komunikasi politik yang mempunyai sasaran terhadap khalayak (masyarakat pemilih), sangat diperlukan keahlian dalam menghadapi sebuah kontestasi pilkada.⁶

Namun keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh penentuan strategi komunikasi. Jika tidak ada strategi komunikasi yang baik dan efektif dari proses komunikasi (terutama komunikasi media massa), bukan tidak mungkin akan menimbulkan pengaruh negatif.

Bila ditinjau dari pergerakan komunikasi politik tentu tim sukses sangat berperan dalam mempromosikan sang calon bupati, sebagaimana yang disampaikan oleh Romi Syahputra ketua tim sukses Akmal Ibrahim dan Muslizar MT. Menurutnya, usaha untuk membuat masyarakat senang terhadap calon yang ditawarkan maka perlu komunikasi yang memasyarakat, artinya tim perlu berkomunikasi secara merakyat guna calon yang ditawarkan dapat menarik simpatisan masyarakat, tidak mengumbar janji dan juga tidak melakukan pembohongan publik terhadap calon bupati dan wakil bupati yang sedang dipromosikan.⁷

Menarik bila melihat penjelasan ketua tim sukses Bapak Romi Syahputra yang menyatakan tentang tidak perlunya pembohongan publik, bila melihat pengalaman kepemimpinan Akmal Ibrahim pada periode sebelumnya, Akmal

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Akmal Ibrahim, SH calon Bupati Aceh Barat Daya Periode 2017-2022 pada tanggal 15 Februari 2018

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Romi Syahputra Ketua TIM Kabupaten Pemenangan calon Bupati Akmal Ibrahim dan Muslizar MT, pada tanggal 17 Februari 2018

Ibharim telah menimpa oleh beberapa kasus yang menjeratnya, seperti pembebasan lahan rakyat di Kecamatan Babahrot, sehingga menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat Aceh Barat Daya, meskipun sempat mendepak dalam jeruji besi dalam kurun waktu 3 bulan.

Meski demikian tidak membuat niat Akmal Ibrahim, SH surut dalam mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Barat Daya untuk ke 3 kalinya. Menurutny: “Dengan terjadi kasus ini saya ingin mencalonkan kembali”, Akmal Ibrahim juga menambahkan “saya juga melampirkan dokumen bebas murni yang dikirim serta mengingat kembali tentang program-program ketika menjabat pada periode 2007-2012, dan menjabarkan program-program yang akan datang, dengan adanya musibah yang saya alami bisa menjadi pengalaman buat saya dan saya ingin Abdya cerdas dan lebih maju lagi”.⁸

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa, Akmal Ibrahim tidak akan habis strategi untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Aceh Barat Daya meskipun pernah terseret kasus korupsi, dan semua musibah yang dialaminya akan menjadi batu loncatan untuk meraih kemenangan dalam pemilukada pada tahun 2017.

Namun, hal yang mencoreng kemenangannya juga terjadi, diantaranya ditemukan beberapa bukti, seperti politik uang (*money politik*), masyarakat Aceh Barat Daya merasakan hal itu, seperti yang dirasakan oleh ibu Ayu, masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan yang diberikan uang oleh tim pemenangan Akmal Ibrahim dan Muslizar MT, tim pemenangan membagikan uang tepat sehari

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Romi Syahputra Ketua Tim Kabupaten Pemenangan calon Bupati Akmal Ibrahin dan Muslizar MT, pada tanggal 17Februari 2018

sebelum masa pencoblosan, setiap masyarakat diberikan 100.000 sampai 200.000 untuk mencoblos no urut 1, ayu sendiri mendapatkan uang 100.000.⁹

Tidak hanya ibu Ayu yang merasakan. Bapak Masduki warga Kecamatan Babahrot juga merasakan hal sama, pada malam pencoblosan bapak Masduki didatangi pemuda desanya dan memberikan uang 150.000 dengan pesan besok pagi (hari pencoblosan) untuk mencoblos pak Akmal Ibrahim no urut 1.¹⁰

Money politic memang tidak dapat dielakkan dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, hanya saja masyarakat lebih mampu memfilter sosok pemimpin yang tidak dapat membeli suara mereka dengan sejumlah uang, bahkan ada slogan yang dibentang di beberapa wilayah di Aceh Barat Daya, “ambil uangnya jangan coblos orangnya” namun dirasakan belum efektif membendung politik uang di daerah *Breuh Sigupai* tersebut.

C. Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Tim Pemenangan Dalam Menjalankan Strategi Komunikasi Politik Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017

Berbicara tentang masalah peluang dan tantangan, semua pasti dihadapkan pada masalah-masalah dalam keseharian dalam hidup ini. Jadi dalam menjalankan strategi komunikasi politik pastilah ada peluang tantangannya, baik itu dalam skala kecil ataupun besar. Sudah menjadi kewajiban Tim pemenangan untuk menjalankan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin dengan baik dan benar,

⁹Hasil wawancara dengan Ibu Ayu masyarakat Kecamatan Tangan-Tangan, pada tanggal 19 Februari 2018

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Masduki masyarakat Kecamatan Babahrot, pada tanggal 18 Februari 2018

termasuk dalam hal memberikan motivasi anggota tim agar calon bupati yang akan dipromosikan kepada masyarakat dapat diterima dengan baik.¹¹

Begitu juga halnya dalam menjalankan komunikasi politik, sudah sangat mungkin peluang dan tantangan ini dirasakan, banyaknya ide dan masukan membuat suatu komunikasi dari suatu tempat ketempat yang lain sudah sangat mungkin berbeda, perbedaan tersebut sangat memungkinkan terjadi peluang baik, baik itu dalam skala kecil maupun skala besar, namun juga sangat mungkin terjadi tantangan yang dirasakan, karena berbagai macam watak dan tingkah laku suatu masyarakat maka berbeda pula gaya komunikasi yang dilakukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Akmal Ibrahim:

“Peluang bagi tim kami adalah terus menciptakan rasa sosial dan melakukan komunikasi dengan baik supaya proses pengalaman kedepan lebih baik lagi, masyarakat juga sangat menerima kedatangan kami juga merespon dengan baik komunikasi politik yang kami lakukan”.¹² Dalam menciptakan hubungan baik dengan masyarakat Akmal Ibrahim dan tim pemengangan terus menelusuri pelosok dimana keberadaan masyarakat guna mendengarkan keluhan masyarakat untuk bisa diprioritaskan dalam program kedepan sehingga pelaksanaan program akan tepat sasaran, maka oleh sebab itu peluang dari masyarakat sangat dijaga dengan baik.

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak T. Cut Adi Husen Ketua TIM Pemenangan calon Bupati Akmal Ibrahim dan Muslizar MT dari Gampong tengah Kecamatan Kuala Batee, pada tanggal 14 Februari 2018

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Akmal Ibrahim, SH calon Bupati Aceh Barat Daya Periode 2017-2022 pada tanggal 15 Februari 2018

Tim pemenangan juga merasakan peluang yang sama menurut Fitriadi peluang untuk mempromosikan Akmal Ibrahim sangat mudah, dengan banyaknya program Akmal Ibrahim pada periode dahulu yang lebih kepada pro rakyat petani sehingga sangat mudah mempromosikan kepada petani, apalagi mayoritas masyarakat Aceh Barat Daya adalah berkerja sebagai petani. Program yang dicetuskan dalam visi dan misinya pun juga sangat banyak perhatian kepada para petani, sehingga sangat masuk akal untuk menjelaskan programnya.¹³

Meskipun demikian tantangan juga sangat membebani bapak Akmal Ibrahim dan tim pemenganya, seperti yang disampaikan oleh Muslizar MT, menurutnya dengan kasus yang pernah menimpa Akmal Ibrahim sehingga banyak dari pihak lawan menghina dan menfitnah, hal ini membuat masyarakat menjadi bimbang untuk memutuskan dukungannya.¹⁴ Meskipun demikian Tim sangat berkerja keras untuk mencari solusi, selain itu Akmal Ibrahim terus menerus mengklarifikasikan kasus yang menimpanya. Menurutnyasaya berbicara dengan apa adanya yang sudah terjadi kepada masyarakat dan melampirkan dokumen bebas murni bahwa saya tidak bersalah, dan yang saya alami cobaan dari Allah bahwa kedepan saya lebih baik lagi jadi pemimpin.¹⁵

Namun demikian, dalam menjalankan komunikasi politik perlu selalu diawasi, pengawasan ini dianggap sangat penting untuk memantau sejauh mana strategi politik sudah berjalan, dan bagaimana pula hasil yang dicapai dalam rangka waktu

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Fitriadi Ketua TIM Pemenangan Kecamatan Blangpidie calon Bupati Aceh Barat Daya Periode 2017-2022 pada tanggal 22 Februari 2018

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Muslizar MT, calon wakil Bupati, pada tanggal 20 Februari 2018

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Akmal Ibrahim, SH calon Bupati Aceh Barat Daya Periode 2017-2022 pada tanggal 15 Februari 2018

yang ditetapkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Saifullah ketua Tim Kecamatan Babahrot, menurutnya: terus melakukan evaluasi bertahap untuk bisa memperbaiki kendala-kendalanya. Maka oleh sebab itu, dilakukan koreksi pribadi dan golongan serta evaluasi terhadap kerjasama tim.¹⁶

Sangat mungkin melakukan evaluasi disetiap pekerjaan, apa lagi menjalakan strategi komunikasi politik untuk mencapai kemenangan. Setelah melakukan pengawasan maka aspek penting lain yang harus diperhatikan dalam menjalankan strategi komunikasi politik adalah dengan melakukan evaluasi. Evaluasi adalah pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Evaluasi menjadi sangat penting untuk mengetahui positif dan negatifnya pelaksanaan, sehingga dapat memanfaatkan yang positif dan meninggalkan yang negatif. Hal ini terus dilakukan sehingga mendapatkan kemenangan yang ditargetkan.

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Saifullah Ketua tim Pemenangan Kecamatan Manggeng calon Bupati Aceh Barat Daya Periode 2017-2022 Akmal Ibrahim dan Muslizar MT, pada tanggal 24Februari 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi komunikasi politik pemenangan Akmal Ibrahim dan Muslizar MT pada Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017, dilakukan dalam bentuk empat tahapan aksi; pertama, mendengar; kedua, mengajak; ketiga, bicara; dan keempat, menang. Keempat tahapan aksi ini diterapkan pada tahun pemenangan pilkada menjelang pilkada 2017. Dalam menjalankan empat tahapan aksi pemenangan pilkada tersebut, tim pemenangan pasangan Akmal Ibrahim, SH dan Muslizar MT menggunakan strategi komunikasi politik dengan pendekatan komunikasi interpersonal, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Peran media pada pemilu legislatif 2017 sangatlah penting, sehingga hampir semua calon menggunakannya. Bentuk-bentuk komunikasi politik dalam media massa ini bisa berupa iklan, press release, dan dialog interaktif. Sesuai dengan teori model Lasswell: Pembicara – pesan – media – pendengar – pengaruh.
2. Peluang dan tantangan yang dihadapi tim pemenangan Akmal Ibrahim dan Muslizar MT pada dalam menjalankan strategi komunikasi politik Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya 2017, Peluang bagi tim Akmal Ibrahim adalah terus menciptakan rasa sosial dan melakukan komunikasi dengan baik supaya proses pelaksanaan program kedepan lebih baik lagi, masyarakat juga sangat menerima kedatangan tim juga merespon dengan baik komunikasi politik yang tim lakukan. Selain itu peluangnya adalah

banyaknya program Bapak Akmal Ibrahim pada periode 2007-2012 yang lebih kepada pro rakyat petani sehingga sangat mudah mempromosikan kepada petani, apalagi mayoritas masyarakat Aceh Barat Daya adalah berkerja sebagai petani. Program yang dicetuskan dalam visi dan misinya dalam periode ini pun juga sangat memperhatikan masyarakat petani, sehingga sangat masuk akal untuk menjelaskan programnya. Sedangkan tantangannya adalah kasus yang pernah menimpa Akmal Ibrahim sehingga banyak dari pihak lawan menghina dan menfitnah, hal ini membuat masyarakat menjadi bimbang untuk memutuskan dukungannya.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada Tim pemenangan Akmal Ibrahim dan Muslizar MT untuk terus melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat, baik di saat kampanye, maupun setelah meraih kemenangan, agar program-program pro rakyat dapat dijalankan dengan baik.
2. Saran kepada masyarakat untuk dapat menyaring setiap informasi yang disampaikan oleh tim pemenangan Bupati, agar dapat menentukan pilihan yang tepat untuk menjadi bupati dan wakil bupati yang betul-betul berpihak kepada rakyat, juga tidak salah pilih pemimpin yang telah terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathori, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: paradigma, teori, aplikasi dan komunikasi politik Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ardial, *Komunikasi Politik*, Jakarta: PT Indek Permata Puri Media, 2010
- Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, Bandung: CV Pustaka Setya, 2012.
- A.w. Widjaja, *Ilmu Komunikasi pengantar studi*, Jakarta: Rineka cipta, 2000
- Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Prenada Media Group 2016.
- Cassandra L. Book, Human Communication: Pricples, Context, and skill, dalam buku Deddy Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Jakarta: Sofmedia, 2012.
- Dani Vardiansyah, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Bogor Selatan: Ghilia Indonesia 2004.
- Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, ter. Tjun Sujarman (Bandung Rosdakarya 1994
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2011.
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- DeddyMulyana, *Ilmu Politik, Suatu Pengantar*, Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2001.
- Hafied Canggara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Cetakan IV Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2004.

- Hafied Canggara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Jalaluddin Rahmad, *Nuansa-Nuansa Komunikasi*, Bandung: Rosdakarya 2004.
- Julianto dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2013
- Joseph Straubhardan Robert Larose, *Communication Media In the Information Society*, dalam Deddy Mulyana, *Ilmu Politik: Suatu Pengantar*, Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghilia Indonesia, 1985.
- Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian*, Bandung: RemajaRosdaKarya, 2010.
- Onong Uchjnan effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Oong Uchjana Efendy, *Dimensi-Dimensi Komunikasi*, Bandung: Remaja Karya, 1992.
- Onong Ujana Efendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Citra, Aditya Bakti. 1993.
- Onong Uchana Efendi, *Dimensi Komunikasi* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Onong Uchjana, *Kamus Komunikasi: Teori dan Praktek*, Bandung: Rosdakarya, 2005.

- Philipus dan NurulAini, *Sosiologi dan Politik*, Jakart: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rafardhan, *Strategi Radio "Silaturahmi" Am 720 Cibubur Bekasi Dalam Mempertahan-kan Eksistensinya Sebagai Media Dakwah*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Rahmat, *Efektivitas Berkomunikasi dalam Islam*, Cet. I; Bandung: Mizan, 1999.
- Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhasrimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipt, 1993.
- T. May Rudy, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*, Bandung: Refika Aditama 2005.
- Topo Santoso & Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta Utara: PT. Grafindo Persada: 2004.
- UUD Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1
- Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*, (Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010),

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Daftar Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Lampiran 4 : Surat Ketrrangan Selesai Penelitian dari KIP
- Lampiran 5 : Surat Ketrrangan Selesai Penelitian dari Bupati Aceh Barat Daya
- Lampiran 6 : Foto Dokumentasi Wawancara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Thaibah
2. Tempat / Tgl. Lahir : Babahlhok / 20 Juli 1996
Kecamatan Blangpidie Kabupaten/Kota Aceh Barat Daya
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM / Jurusan : 140401128/ KPI
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Lamkuta
 - a. Kecamatan : Blangpidie
 - b. Kabupaten : Aceh Barat Daya
 - c. Propinsi : Aceh
8. Email : Thaibah001@gmail.com

Riwayat Pendidikan

9. SD Negeri 1 Lamkuta Tahun Lulus 2008
10. SMP Negeri 3 Blangpidie Tahun Lulus 2011
11. SMA Negeri 1 Tangan-Tangan Tahun Lulus 2014
12. UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam

Orang Tua/Wali

13. Nama ayah : Syafaruddin
14. Nama Ibu : Narmila
15. Pekerjaan Orang Tua : Petani
16. Alamat Orang Tua : Desa Lamkuta
 - a. Kecamatan : Blangpidie
 - b. Kabupaten : Aceh Barat Daya
 - c. Propinsi : Aceh

Banda Aceh, 11 Juli 2018
Peneliti,

(Thaibah)